

**TESIS**

**PERILAKU POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF  
TAHUN 2014 DI KECAMATAN BATULAPPA  
KABUPATEN PINRANG**

*POLITICAL BEHAVIOR OF WOMEN IN THE LEGISLATIVE  
ELECTION IN 2014 IN BATULAPPA SUB-DISTRICT  
PINRANG REGENCY*

**ABD. RASYID  
P1600214008**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2016**

**LAKU POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF  
TAHUN 2014 DI KECAMATAN BATULAPPA  
KABUPATEN PINRANG**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Sosiologi

Disusun dan diajukan oleh

**Abd. Rasyid**

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016

**PERILAKU POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN  
LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN BATULAPPA  
KABUPATEN PINRANG**

**ABD. RASYID  
P 1600214008  
S O S I O L O G I**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**TESIS**

**PERILAKU POLITIK PEREMPUAN PADA  
PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 DI KECAMATAN BATULAPPA  
KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

**ABD. RASYID**

**Nomor Pokok 1600214008**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal **22 Nopember 2016**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat

**Dr. Suparman Abdullah, M.Si.**  
Ketua

**Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.**  
Anggota

Ketua Program Studi  
Ilmu Sosiologi,

**Dr. Suparman Abdullah, M.Si.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

**Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si.**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ABD. RASYID

Nomor Mahasiswa : P1600214008

Program Studi : SOSIOLOGI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabilah dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, November 2016

Yang menyatakan



Abd. Rasyid

## **PRAKATA**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah paradigma berpikir umat manusia sehingga menjadi beradab seperti sekarang ini.

Penulisan Tesis yang berjudul “Perilaku Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang) ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap akhir pendidikan Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelesaian penulisan Tesis ini, begitu banyak hambatan, tantangan dan rintangan yang penulis hadapi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan penuh ketulusan hati kepada **Bapak Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si** selaku Pembimbing I, dan kepada **Bapak Dr. Rahmat Muhammad, M.Si** selaku Pembimbing II, yang meskipun di tengah-tengah kesibukannya masih dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis.

Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada :

1. Terkhusus dan Teristimewa kedua orang tuaku, Ayahanda Abd. Muiz dan Ibunda (Almarhumah) Hasnia yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan membimbing penulis, serta do'a yang tiada henti-hentinya dalam mewujudkan cita-cita penulis.
2. Para Responden dan informan penulis atas partisipasinya, penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi sekaligus sebagai Pembimbing I dan bapak Dr. Rahmat Muhammad, M.Si selaku pembimbing II serta bapak Dr. Mansyur Radjab, M.Si, Prof. Maria E Pandu, MA, Dr. Ramli AT, M.Si masing-masing selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Sosiologi, Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Saudara-saudaraku tersayang Tanpa terkecuali dan terkhusus kepada Kak Hasni selaku pengganti peran ibunda Almarhumah yang telah mendahului yang telah memberikan do'a dan menyemangati serta memotivasi penulis.
6. Teman-teman seperjuanganku di Pasca sosiologi 2014 (Ratnah, Jusnah, Jusmah, Restu, Bunda, Astri, Nimrah, Nova, Nutfa, Firman, Wandy, Bagus, Accank, Bahrul, Saleh, Sabar, dan Pak Hamid), kebersamaan kita

7. semua saat bercanda tawa dan melewati suka duka sejak awal masuk hingga tahap penyusunan takkan ku lupakan.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini.

Secara kodrat penulis menyadari sepenuhnya, bahwa untuk memperoleh sebuah karya yang sempurna sungguh amat sulit. Tentunya butuh waktu panjang melalui kaji ulang dan evaluasi dari keterbatasan yang penulis miliki, baik secara pragmatis maupun implementasi.

Akhirnya penulis membuka diri bagi setiap saran dan kritik yang sifatnya membangun, dari berbagai pihak dan pemerhati dengan senang hati penulis terima. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Wassalamu Alaikum Wr Wb.

**Makassar, November 2016**

**P e n u l i s**

**Abd. Rasyid**

## ABSTRAK

**ABD. RASYID**, *Perilaku Politik Perempuan pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Suparman Abdullah dan Rahmat Muhammad).

Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku politik perempuan dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran, yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Responden dan informan penelitian meliputi unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik penyampelan purposif. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, wawancara mendalam, kajian kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri atas tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komponensial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa jenis perilaku politik perempuan di Kecamatan Batulappa pada pemilihan anggota legislatif 2014. Pertama, pendapat dan respon mereka terhadap politisi perempuan (76,0%). Kedua, keterlibatan mereka dalam pemilihan anggota legislatif 2014 cukup tinggi (91,0%). Ketiga, sikap mereka dalam menjatuhkan pilihan politiknya dilihat dari konsep rasionalitas, rasional retrospektif (pemilih yang berlandaskan pengalaman dan integritas), rasional pragmatis-adaptif (pemilih yang berdasarkan untung rugi), dan rasional perspektif (pemilih yang menyadari akan perubahan yang lebih baik). Selanjutnya, faktor yang memengaruhi perilaku politik perempuan antara lain faktor pengetahuan (sebanyak 67,0% responden mengaku tidak tahu); faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga dan etnis (53,0% yang memilih karena hubungan emosional); dan faktor intervensi atau tekanan dari kelompok berkepentingan.



## ABSTRACT

**ABD. RASYID.** *Political Behavior of Women in the Legislative Election in 2014 in Batulappa Sub-District, Pinrang Regency* (supervised by **Suparman Abdullah and Rahmat Muhammad**)

This research aimed to investigate the political behavior of women in 2014 election of the legislative members in Batulappa Sub-District, Pinrang Regency.

The research used a mixture method of two methods, namely the quantitative and the qualitative methods. The respondents the informants were the government officials, community leaders, and the leader of women who were chosen using Purposive Sampling technique. The data were collected using observation, in-depth interviews, slibrary studies, and documentation. The technique of data analysis consisted of the data reduction, data presentation, and the conclusion. Finally the data were analyzed using the technique of the componential analysis.

The research results indicated that there were several types of the women's behavior in Batulappa Sud-District in the 2014 election of the Legislative members. First, their opinions and responses towards the women politicians was 76.0%. Seond, Their involvement in the election of the legislative members in 2014 was high enough, about 91,0%. Third, Their attitude in deciding the political votes as seen from the rational concept was rational retrospective, or the voters who based their votes on their experience and integrity, rational pragmatic-adaptive, i.e. the voters who based their votes on profit/loss, and rational perspective, i.e. the voters who were aware of the better changes. Furthermore, the factors affecting their political behavior were the knowledge factor: i.e. 67.0% of the respondents admitted that they did not know, the environment factor, such as the family and ethnic environment, i.e. 53.0% who voted because of the emosional factor, and the intervention factor or the pressure of the interest groups.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
2.1 Tinjauan Tentang Perilaku Politik .....	8
2.2 Perspektif Teori Tindakan Sosial .....	14
2.3 Perspektif Teori Perilaku.....	18
2.4 Perspektif Pilihan Rasional .....	19
2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik .....	24
2.6 Tipe Perilaku Pemilih.....	34

2.7	Pendekatan Perilaku Pemilih.....	40
2.8	Defenisi Pemilihan Legislatif .....	44
2.9	Kerangka Pemikiran .....	46
<b>BAB. III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Metode Penelitian .....	49
3.2	Lokasi Penelitian.....	49
3.3	Populasi dan Sampel .....	50
3.3.1	Populasi Penelitian .....	50
3.3.2	Sampel Penelitian .....	50
3.3.2.1	Menentukan Ukuran Sampel Kuantitatif .....	51
3.3.2.2	Penentuan Responden .....	52
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.5	Penentuan Informan .....	56
3.6	Analisis Data .....	57
3.7	Defenisi Konseptual dan Operasional .....	59
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Batulappa.....	63
4.1.1	Sejarah Singkat Kecamatan Batulappa .....	63
4.1.2	Letak Geografis.....	64

4.1.3	Demografi .....	65
4.1.4	Pendidikan.....	67
4.1.5	Kesehatan .....	67
4.1.6	Ekonomi .....	68
4.1.7	Pemerintahan.....	69
4.2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Batulappa .....	70

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Perilaku Politik Perempuan di Kecamatan Batulappa Pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014 .....	72
5.1.1	Tanggapan Pemilih Terhadap Politisi Perempuan .....	72
5.1.2	Keterlibatan Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014	79
5.1.3	Sikap Dalam Menjatuhkan Pilihan .....	83
	5.1.3.1 Model Rasional Retrospektif.....	84
	5.1.3.2 Model rasional pragmatis-adaptif .....	85
	5.1.3.3 Model Rasional Prospektif.....	91
5.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Perempuan di Kecamatan Batulappa .....	96
5.2.1	Pengetahuan Pemilih .....	99
5.2.2	Lingkungan .....	111
5.2.3	Intervensi atau Tekanan .....	114

5.3	Analisa Data Lapangan Dengan Teori.....	118
5.3.1	Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber .....	118
5.3.2	Perspektif Teori Pilihan Rasional J. Coleman .....	120
5.3.3	Perilaku Politik Perempuan .....	122
5.3.4	Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Perempuan ..	124
 BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan .....	127
6.2	Saran .....	129
DAFTAR FUSTAKA .....		131
LAMPIRAN .....		134
RIWAYAT HIDUP.....		137

## DAFTAR TABEL

### BAB III

Tabel 1. Nama Informan Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin .....	57
---	----

### BAB IV

Tabel 1. Jarak Kecamatan Batulappa Dari Ibu Kota Kabupaten .....	65
--	----

Tabel 2. Daftar Banyaknya Rumah Tangga Penduduk Di Kecamatan Batulappa .....	65
---	----

Tabel 3. Daftar Pembagian Wilayah Desa/Kelurahan Di Kecamatan Batulappa .....	70
--	----

Tabel 10. Daftar DPT Perkecamatan Di Kabupaten Pinrang 2014.....	71
--	----

### BAB V

Tabel I. Tingkat Penguasaan Responden Tentang Politik.....	73
--	----

Tabel 2. Pendapat Pemilih Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Politik.....	74
---	----

Tabel 3. Pilihan Responden terhadap Caleg pada pemilihan Anggota Legislatif 2014 .....	76
---	----

Tabel 4. Tingkat partisipasi/ menggunakan hak politik pemilih pada pemilihan legislative tahun 2014 .....	81
--	----

Tabel 5. Hal apa yang membuat responden ikut serta dalam pemilihan Anggota Legislatif 2014 .....	82
---	----

Tabel 6. Indikator dalam memilih kandidat .....	84
---	----

Tabel 7. Pandangan Responden Terhadap Money Politik .....	87
---	----

Tabel 8. Pandangan responden terhadap caleg yang melakukan money Politik.....	89
--	----

Tabel 9. Yakin dengan perubahan yang lebih baik .....	92
Tabel 10. Tingkat pengetahuan responden terhadap politik .....	101
Tabel 11. Sumber Informasi Calon Anggota Legislatif 2014 .....	103
Tabel 12. Frekuensi terhadap pernah tidaknya mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan semacamnya tentang politik dari Pemerintah, partai politik atau LSM .....	104
Tabel 13. Tingkat pengetahuan perempuan terhadap caleg 2014 .....	109
Tabel 14. Hal yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih calon legislative .....	113
Tabel 15. Beberapa factor dalam menjatuhkan pilihan .....	115
Tabel 16. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang Periode 2014-2019 .....	116

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilu 2014 memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan, ada banyak peran yang dapat dilakukan dalam proses penting kenegaraan tersebut. Bagaimanapun juga perempuan merupakan salah satu *entitas* yang memiliki potensi, kemampuan, dan kelebihan yang tidak kalah dengan laki-laki. Hal penting lain yang melandasi pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik khususnya legislative adalah fakta dimana separuh jumlah penduduk perempuan Indonesia adalah perempuan. Mengabaikan perempuan dalam pembuatan keputusan politik sama halnya dengan menyingkirkan mayoritas penduduk Indonesia dalam proses politik (Efriza, 2012). Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan yang memiliki persepektif gender.

Perempuan memiliki peran dan posisi dalam pembangunan suatu Negara. Dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan, kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan, dalam perundang-undangan politik yang tertera dalam UUD tersebut telah tercermin bahwa kaum perempuan sama haknya dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih, itu artinya peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi, lebih-lebih dalam demokrasi seperti Indonesia, tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi suatu konsekuensi logis guna mewujudkan kehidupan Negara yang

partisipatoris. Yakni menjamin setiap warga Negaranya berperan aktif dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan dilembaga-lembaga Negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan system yang benar-benar demokratis, seperti yang tertuang dalam pasal 53 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang memuat aturan tentang keterwakilan minimal 30% bagi perempuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Tidak terkecuali pula pada proses pemilihan umum, yaitu bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama sebagai warga Negara yang wajib menggunakan hak pilihnya demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam pemilu, perempuan juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, maka dapat diuraikan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda antara laki-laki dengan perempuan yang kemudian dapat juga berpengaruh terhadap perilaku politik perempuan. Terdapat perbedaan mendasar tentang gender yang meliputi kapasitas biologis, lingkungan social perempuan dan laki-laki, serta interaksi antara biologi dan budaya. Tiga perspektif umum tentang asal-usul pola

gender didasarkan pada faktor biologis, sosialisasi, dan peran sosial (Fakih, 1996). Terkait dengan nilai dan perilaku politik perempuan, menarik untuk dilihat pertimbangan voter khususnya perempuan dalam sebuah pemilihan seorang pemimpin. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang khususnya perempuan untuk menentukan pilihan politiknya.

Pada pemilu legislatif 2014, terdapat beberapa hal yang menjadi khas, yakni ruang politik bagi para caleg untuk bertarung menjadi sangat terbuka. Hal ini disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung penentuan pemenang kursi DPR dan DPRD berdasarkan suara terbanyak, bukan lagi daftar urut partai. Putusan ini juga mendorong sengitnya pertarungan antar calon legislatif. Mengingat calon partai yang menerima suara terbanyak sendirilah yang akan memenangkan kursi partai tersebut.

Tidak banyak caleg maupun partai yang memperhatikan segmen pemilih perempuan. Padahal jika kita bandingkan secara kuantitatif, pemilih perempuan lebih besar dari pemilih laki-laki. Seperti yang terjadi pada wilayah dimana penulis melakukan penelitian ini, di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang berdasarkan data DPT Pemilu Legislatif tahun 2014 terdapat 3.760 (48,66%) pemilih Laki-Laki dan 3.967 (51,34%) pemilih perempuan. Jumlah pemilih di kecamatan ini lebih dominan pemilih perempuan. Jumlah tersebut adalah sebuah segmen pemilih yang signifikan yang jika dapat dipahami pola perilaku memilihnya, maka bukan hal yang

mustahil suara itu akan mengantarkan salah seorang atau kandidat menuju kursi dewan.

Pemilu 2014 lalu menjadi hal yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, dimana nasib bangsa indoneisa ditentukan selama satu periode kedepan. Pemilihan legislative sebagai bagian dari pemilihan umum pada saat itu telah berhasil mengantarkan wakil-wakil rakyat ke kursi empuk kekuasaan, baik di DPR RI, DPRD Provinsi sampai DPRD kabupaten/Kota, Kabupaten Pinrang sebagai daerah yang memiliki pemilih yang terbilang besar diantara beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan berhasil mendudukkan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sebanyak 40 orang yang terdiri dari 37 laki-laki dan 3 perempuan. Meskipun terbilang sukses dalam menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2014 lalu, namun dibalik kesuksesan tersebut ada beberapa hal yang menjadi point penting yang harus dilihat secara obyektif terutama persoalan perilaku politik para pemilih pada saat itu khususnya pemilih perempuan yang hanya mempunyai tiga wakil yang berhasil duduk secara representatif, hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa hal tersebut dengan mengambil satu sampel Kecamatan yang menjadi fokus yakni kecamatan Batulappa.

Berdasarkan data tersebut, tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan substantif bagi kita semua terkait dengan keterwakilan caleg perempuan dilegislatif pada tahun 2014 lalu. Mengingat pemilih perempuan lebih dominan dibanding pemilih laki-laki, yang pada kenyataannya dari 11 total kursi dewan yang diperebutkan di dapil satu yang meliputi tiga

Kecamatan yaitu Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang tersebut hanya satu Caleg perempuan yang terpilih.

kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan argumen-argumen pragmatis yang menganggap bahwa, besarnya jumlah pemilih perempuan seharusnya linier dengan keterwakilan perempuan di legislatif. Argumen pragmatis ini mengajukan klaim bahwa perempuan lebih cenderung memberikan suaranya pada partai-partai yang memilih kandidat perempuan. Mereka memanfaatkan argumen-argumen perbedaan untuk mempertahankan bahwa perempuan memiliki pengalaman-pengalaman dan kepentingan khusus yang hanya dapat dimengerti dan diwakili oleh perempuan. Argumen ini membuat keutamaan yang lain dengan berpendapat bahwa melalui keterlibatan perempuan, politik akan menjadi lebih konstruktif dan ramah (Firmanzah, 2012).

Hal inilah yang menjadi fokus penelitian penulis terkait dengan perilaku pemilih perempuan dalam memberikan hak politiknya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **“Perilaku politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Cakupan yang cukup luas dari penelitian ini, dapat difokuskan dengan memperkecil wilayahnya. Maka peneliti membatasi pertanyaan yang akan dijawab yaitu:

1. Bagaimana perilaku politik perempuan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan politik perempuan pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menggambarkan perilaku Politik perempuan pada pemilihan Legislatif tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan pada pemilihan umum tahun 2014.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya literatur-literatur soial-politik yang telah ada, khususnya tentang perilaku politik perempuan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang perilaku politik perempuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, seperti dalam menyusun suatu kebijaksanaan, bagi pemerhati perempuan, dan juga partai politik.
- b. Sebagai bahan rujukan kepada masyarakat, pelaku-pelaku politik dan tentunya para perempuan khususnya yang di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dan seluruh pemerhati politik dan perilaku Perempuan pada umumnya .
- c. Diharapkan, dari penelitian ini semua elemen yang ada dalam masyarakat dapat mengetahui tentang perilaku politik perempuan dan adanya kesempatan yang sama sebagai warga negara untuk terlibat dalam hal politik dan pemerintahan.
- d. Diharapkan bisa menjadi referensi akademik untuk para mahasiswa dan peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Perilaku Politik**

Perilaku politik sebagai salah satu kajian dalam ilmu sosiologi politik, di Indonesia kajian ini menjadi ramai diperbincangkan sejak system politik Negara kita beralih ke sistem demokrasi langsung, mengingat gaya dan jenis karakter para actor politik sangat bervariasi, dalam hal ini perilaku politik dapat dipahami dari berbagai sumber, Menurut Sudijono Sastroatmodjo (1995:8), perilaku politik adalah:

“tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Perilaku politik ini diarahkan pada pencapaian konsensus atau kesepakatan dalam mewujudkan tujuan dari masyarakat dan pemerintah.”

Sudijono (1995:3) juga menjelaskan bahwa perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, antara kelompok, dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik. Ramlan Surbakti memiliki pandangan yang sejalan mengenai makna perilaku politik. Surbakti merumuskan perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, dimana yang melakukan kegiatannya adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan tersebut terbagi dua, yaitu fungsi pemerintahan yang dipegang

pemerintah dan fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat (Ramlan Surbakti, 1992:167)

Setiap masyarakat tidak akan lepas dari kehidupan politik yang diikuti juga dengan berbagai tindakan politik dalam kesehariannya. Tindakan politik tersebut merupakan bagian dari perilaku politik. Masyarakat bertindak disebabkan berbagai alasan yang biasanya sebagai bentuk aspirasi atau kritik. Berdasarkan penjelasan di atas, perilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan memberikan pengaruh terhadap pengambilan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu. Perilaku politik tersebut dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup “suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan” (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1994). Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan

pelaksanaan keputusan politik (Ramlan Surbakti dalam Sastroatmodjo, 1995:2). Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena di samping perilaku politik masih ada perilaku yang lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan sebagainya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik (Sastroatmodjo dalam Puspasari, 2012:12). Perilaku politik merupakan produk sosial sehingga untuk memahaminya diperlakukan dukungan konsep dari beberapa disiplin ilmu. Konsep sosiologi, psikologi, sosial, antropologi sosial, geopolitik, ekonomi, dan konsep sejarah digunakan secara integral. Dengan demikian, memahami perilaku politik tidak hanya menggunakan konsep politik saja, tetapi juga didukung konsep ilmu-ilmu sosial lain. (Surbakti, 1999:5) Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi. Sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk ke dalam kategori kegiatan ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menukar,

menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik (Surbakti, 1999: 5).

Kaitan dengan perilaku politik ini Michael Rush (2005) menjelaskan tentang kaitan antara perilaku dan budaya politik, budaya politik dimana kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dalam pendekatan budaya politik, individu merupakan subyek kajian yang utama dan bersifat empiris, dalam arti pendapat orang per oranglah yang membangun kesimpulan penelitian. Ini berbeda dengan pendekatan filsafat politik, misalnya, yang lebih bersifat abstrak oleh sebab pendapat dibangun oleh seseorang tanpa terlebih dahulu melihat fakta lapangan, atau paling tidak, melalui serangkaian penelitian yang melibatkan orang banyak.

Dengan demikian pendekatan budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik (Keith Faulks, 2014).

Berkaitan dengan itu, Samuel P. Huntington dalam bukunya Tertib Politik ditengah pergeseran kepentingan massa (2003) membagi beberapa jenis partisipasi dan perilaku politik antara lain sebagai berikut :

- Kegiatan pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan dalam kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan

bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

- Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintahan dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi keputusan pemerintah.
- Mencari Koneksi (Contacting), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.
- Tindakan kekerasan (violence), juga dapat berupa partisipasi politik yakni upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (huru-hara, pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem politi (revolusi).

Jenis Perilaku politik diatas dapat dijumpai dalam suatu Negara atau daerah, dimana ada pihak yang memerintah dan ada yang diperintah, pada

dasarnya manusia yang melakukan kegiatan ini dibagi menjadi dua, yakni warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan (penjabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya.

Selain itu, beberapa factor yang dapat mempengaruhi perilaku politik adalah sebagai berikut:

*Pertama*, perlu dipahami dalam konteks latar belakang histories. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu. Hal ini disebabkan budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang masa.

*Kedua*, faktor kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya Indonesia merupakan hal yang rawan bagi terciptanya disintegrasi. Kondisi ini mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat, kesenjangan pemerataan bangunan, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi mempengaruhi proses sosialisasi politik.

*Ketiga*, faktor budaya politik memiliki pengaruh dalam perilaku politik masyarakat. Berfungsinya budaya politik ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa dan struktur politiknya. Kemajuan budaya Indonesia

memengaruhi budaya budi bangsa. Berbagai budaya daerah pada masyarakat Indonesia berimplikasi pada terciptanya sebuah bentuk perilaku politik dengan memahami budaya politik masyarakat yang dipandang penting untuk memahami perilaku politik.

*Keempat*, perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan merupakan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai agama dan keyakinannya proses politik dan partisipasi warga negara paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang.

*Kelima*, pendidikan dan komunikasi juga mempengaruhi perilaku politik seseorang. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Komunikasi yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam kegiatan politiknya.

*Keenam*, faktor kepribadian mempengaruhi perilaku politik.

*Ketujuh*, faktor lingkungan sosial politik. Faktor ini mempengaruhi aktor politik secara langsung seperti keadaan keluarga, cuaca, ancaman. Lingkungan sosial politik saling mempengaruhi dan berhubungan satu dengan yang lain dan bukannya sebagai faktor yang berdiri sendiri.

## **2.2 Perspektif Teori Tindakan Sosial**

Perilaku memilih dalam Pemilihan Anggota Legislatif merupakan perilaku politik yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana

tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang dengan penuh arti diorientasikan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. Menurut Johnson dalam Upe (2008:90) bahwa tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (*a subjective meaning*) bagi dan dari aktor pelakunya.

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Weber dalam Ritzer 1975). Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya). Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut kedalam empat tipe. Pertama, *instrumentally rasional*, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam kehidupan manusia yang dengan

alat untuk mencapai hal tersebut telah dirasionalkan dan dikalkulasikan sedemikian rupa untuk dapat dikejar atau diraih oleh yang melakukannya. Kedua, *value rational*, yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Ketiga, *affectual (especially emotional)*, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Keempat, *traditional*, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging.

Beberapa asumsi fundamental teori aksi (*action theory*) yang dikemukakan oleh Hinkle dalam Upe (2008:90) antara lain :

1. Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
2. Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara teknik prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang sedang terjadi dan yang akan dilakukan.
5. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.

Selanjutnya, secara khusus dalam Ritzer (2004:78) Parsons menyusun skema unit-unit dasar dari tindakan sosial dengan karakteristik :

1. Adanya individu selaku aktor.

2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuan.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakan dalam mencapai tujuan.
5. Aktor berbeda dibawah kendali nilai-nilai, norma dan berbagai nilai abstrak yang mempengaruhi dalam memilih dan menentukan tujuan. Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan, tetapi putusan akhir ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai *voluntarisme* yaitu kemampuan melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.

Baik Weber maupun Parsons menempatkan individu sebagai makhluk yang kreatif, dalam bertindak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian menurut Veegerindividualitas manusia menampakkan diri dari dalam tindakannya yang sadar dan sengaja. Sebagai individu ia bebas, mampu menentukan apa yang harus dilakukan.

Nashir dalam Upe (2008:93) mengatakan kepentingan sebagai tujuan yang dikejar oleh aktor merupakan faktor yang penting dalam perilaku politik, individu maupun kelompok yang selalu melekat dalam proses politik. Kepentingan merupakan kekuatan pendorong utama bagi manusia dan seperti tindakan manusia didasarkan atas pemilikan kepentingan.

Dengan demikian perilaku politik dalam hal ini perilaku memilih perspektif tindakan sosial adalah tindakan sosial adalah tindakan individu dan kelompok dalam melakukan tindakan-tindakan politik, memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan tujuan politik dari aktor yang memainkannya. Bahkan tingkah laku politik merupakan hasil pertemuan faktor-faktor struktur kepribadian, keyakinan politik, tindakan politik, individu dan struktur serta proses politik menyeluruh.

### **2.3 Perspektif Teori Perilaku**

Dalarn sosiologi politik terdapat beberapa perspektif teori yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku politik, karena perilaku politik merupakan sebuah gejala yang biasa diamati. Penelitian tentang perilaku pemilih cukup relevan digunakan pendekatan behavior Menurut Budiarjo yang dikutip Upe (2008:95).

#### **2.3.1 Behavioral**

Ritzer (2007:356) mengatakan sosiologi perilaku berawal dari behavioral, dimana sosiologi perilaku memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap perilaku aktor. Hubungan ini adalah dasar untuk pengkondisian operan (operant condisioning) atau proses belajar melaluinya perilaku diubah oleh konsekuensinya. Dalam teori behavioral dikenal pemahaman *reinforcement* yang dapat diartikan sebagai *reward* (ganjaran). Perulangan atas suatu tindakan tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap tindakan itu sendiri.

Perulangan ini dirumuskan dalam pengertian terhadap aktor. Dimana suatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor, maka tindakannya tidak akan diulang.

#### **2.4 Perspektif Pilihan Rasional**

Berbagai pendekatan sebelumnya telah menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku politik, dalam hal ini pilihan politik perempuan dan juga berbagai penjelasan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi pilihan politik perempuan.

Teori pilihan rasional menurut James S. Coleman dalam Wirawan (2012:191). adalah “tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan itu) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Tetapi, Coleman selanjutnya menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Teori pilihan rasional adalah penjelasan yang mendasar dalam melihat perilaku politik perempuan yang mencakup pilihan-pilihan politik dan berbagai hal yang mempengaruhinya. Sosiologi Perilaku memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap perilaku actor.

Dalam penjelasan Ritzer & Goodman, antara perilaku aktor yakni individu dan lingkungannya, akan terjadi proses yang saling mempengaruhi

satu sama lain. Sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya dan peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Dari penjelasan Ritzer dan Goodman tentang hubungan antara perilaku individu yang berkaitan dengan lingkungan, tampak jelas dalam penjelasan Nursal tentang pilihan politik perempuan yang cenderung berubah-ubah pada setiap pemilihan umum. Peristiwa-peristiwa politik tertentu yang diuraikan oleh Nursal merupakan lingkungan yang ada di sekitar aktor yang mempengaruhi pilihan politik individu.

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, yang dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Perempuan sebagai aktor atau individu juga memiliki tujuan dan maksud, dan tindakannya tertuju pada tujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks pemilihan umum dalam hal ini pemilihan umum anggota legislatif perempuan sebagai warga negara dan sebagai individu dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan maksud dalam momen politik pemilihan umum anggota legislatif. Tindakan-tindakan perempuan sebagai individu merupakan upaya untuk mencapai hal-hal yang dimaksudkan secara rasional dalam proses pelaksanaan pemilihan umum.

Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan tindakan

pilihan aktor. Penjelasan tentang pilihan rasional seperti yang diungkapkan oleh Ritzer dan Goodman, merupakan penjelasan tentang letak rasionalitas dalam menjustifikasi pilihan yang pada dasarnya bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Tidak dititikberatkan pada sumber pilihan tapi didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai.

Perempuan sebagai individu dalam proses pemilihan umum anggota legislatif memiliki pilihan rasional yang didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak menitikberatkan pada sumber-sumber pilihan. Lebih lanjut diungkapkan oleh James S. Coleman, dalam teori pilihan rasional dengan gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan. Coleman juga menitikberatkan pada tindakan perseorangan yang juga mengarah pada suatu tujuan tertentu yang mengaitkan nilai dalam hal ini adalah pilihan dan juga preferensi. Pilihan yang didasarkan pada preferensi akan melibatkan berbagai informasi dalam suatu lingkungan sosial.

Friedman dan Hechter mengemukakan dua gagasan lain yang menjadi dasar teori pilihan rasional; pertama, adalah kumpulan mekanisme atau proses yang menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk menghasilkan akibat sosial, yang kedua adalah bertambahnya pengertian tentang pentingnya informasi dalam membuat pilihan rasional<sup>28</sup>. Informasi yang dimiliki oleh individu akan dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas dari informasi tersebut dan hal ini nantinya akan mempengaruhi pilihan

rasionalnya. Pilihan rasional perempuan juga didasarkan pada informasi yang dia terima dan dijadikan sebagai preferensi seperti yang di ungkapakan oleh Coleman sebelumnya. Dalam pemilihan umum anggota legislatif, perempuan adalah sebagai individu yang memiliki pilihan yang didasarkan pada rasionalitas dalam memilih. Rasionalitas dalam menjatuhkan pilihannya didasarkan pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemilih perempuan dan dikaitkan dengan informasi dan preferensi yang dimilikinya.

Selanjutnya Ritzer (2007:357) menjelaskan Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi klasik. Berdasarkan berbagai jenis yang berbeda, menghimpun apa yang mereka sebut sebagai model kerangka teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai maksud. Hal tersebut dimaksudkan aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Hal terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Kemudian Ritzer menerangkan meskipun teori pilihan rasional berawal dari tujuan atau maksud aktor, namun teori ini memperhatikan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama tindakan.

1. *Pertama* adalah keterbatasan sumber. Aktor mempunyai sumber yang berbeda-beda maupun akses yang berbeda terhadap sumberdaya yang lain.

Bagi aktor yang mempunyai sumberdaya yang besar, pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi bagi aktor yang mempunyai sumberdaya sedikit, pencapaian tujuan akan sukar atau sulit. Aktor dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal dan tujuan mungkin meliputi gabungan antara peluang untuk mencapai tujuan utama dan apa yang telah dicapai pada peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan kedua yang paling bernilai.

2. Sumber pemaksa *kedua* atas tindakan aktor individual adalah lembaga sosial. Hambatan kelembagaan ini menyediakan baik sanksi positif maupun sanksi negatif yang membantu mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindarkan tindakan lain.

Selanjutnya, Friedman dan Hechter dalam Ritzer (2007:358) mengemukakan dua gagasan lain yang menjadi dasar teori pilihan rasional. *Pertama*, adalah kumpulan mekanisme atau proses yang menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk menghasilkan akibat sosial. *Kedua*, bertambahnya pengertian tentang pentingnya informasi dalam membuat pilihan rasional.

*Reward* dalam bentuk pemberian dukungan (memilih seorang kandidat) sangat dipengaruhi oleh stimulus yang ada. Stimulus sebagai sebuah produk politik bagi pemilih menurut Kotler, Peter dan Olson sebagaimana yang dikutip oleh Nursal (2004:23), memiliki beberapa tahap respon.

Pertama, *awareness* yakni bila seseorang bila seseorang dapat mengingat atau menyadari bahwa sebuah pihak tertentu merupakan sebuah kontestan pemilih. Dengan jumlah kontestan Pemilihan Anggota Legislatif yang banyak, membangun *awareness* cukup sulit lakukan khususnya bagi partai-partai baru, secara umum para pemilih tidak akan menghabiskan waktu dan energi untuk menghafal nama kontestan tersebut. Kontestan yang tidak memiliki *brand awareness*. Kedua, *knowledge*. Kedua hal tersebut diartikan ketika seseorang pemilih mengetahui beberapa unsur penting mengenai produk kontestan tersebut, baik substansi maupun referensi. Unsur-unsur itu akan diinterpretasikan sehingga bentuk makna tertentu dalam pikiran pernerintah. Ketiga *liking*, yakni tahap dimana seorang pemilih menyukai kontestan tertentu karena satu atau beberapa makna politis yang terbentuk dalam pikirannya sesuai dengan aspirasinya. Keempat, *preference*, yakni tahap dimana pemilih menganggap bahwa satu atau beberapa makna politis yang terbentuk sebagai interpretasi terhadap produk politik seorang, kontestan tidak dapat dihasilkan secara lebih oleh kontestan lainnya. Ada kecenderungan pemilih memilih kontestan tersebut. Kelima, *conviction*, yakni pemilih tersebut sampai pada keyakinan untuk memilih kontestan tertentu.

## **2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik**

Perilaku politik dan pilihan merupakan sebuah konstruksi sosial, sehingga untuk memahaminya diperlukan dukungan konsep dari berbagai berbagai disiplin ilmu. Dalam menganalisis hal tersebut, maka banyak

variabel yang perlu diperhatikan dalam konteks sosial yang sangat dinamis. Mulai dari variabel ekonomi, psikologi sosial, konsep sosiologis geopolitik dan sebagainya (Gaffar, 2005). Berbagai disiplin ilmu atau berbagai variabel digunakan secara menyeluruh dan integral. Sebagai manifestasi sikap politik, pilihan politik tidak dapat dipisahkan dari budaya politik yang oleh Almond dan Verba diartikan sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara didalam sistem itu.

Almond menyebutkan bahwa, tiap sistem politik mewujudkan dirinya di dalam pola orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan politik tertentu. Dia menyebut pola-pola orientasi-orientasi ini sebagai kebudayaan politik. Seseorang dalam suatu komunitas masyarakat akan dihadapkan oleh nilai dan norma yang diterima sebagai suatu kemestian. Hal inilah yang mempengaruhi pola perilaku seseorang beserta orientasi-orientasi terhadap objek-objek yang ada, dan seperti yang disebutkan oleh Almond, bahwa pola-pola orientasi terhadap objek-objek politik, merupakan wujud dari kebudayaan politik suatu komunitas masyarakat.

Dalam suatu masyarakat terdapat suatu nilai-nilai yang dianut sebagai suatu kesatuan pola bertindak, berpikir dan merasakan. Inilah yang disebut sebagai budaya masyarakat secara keseluruhan. Sejumlah elemen kebudayaan dianut dan mempengaruhi perilaku seluruh anggota masyarakat, sementara sejumlah elemen kebudayaan yang lain, meskipun dianggap memiliki salienasi yang tinggi oleh para penganutnya, hanya berlaku di

kalangan anggota kelompok yang sangat terbatas, dalam artian inilah para ahli membedakan pengertian kebudayaan dari sub kebudayaan.

Dari uraian diatas, dapat di katakan bahwa terdapat suatu nilai yang berlaku secara menyeluruh, tapi terdapat pula nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu, dan itu biasanya tidak berlaku bagi kelompok masyarakat lain (Mashod, 1987) . Seperti halnya pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya tentang perilaku memilih, itu bersumber dari penelitian yang diadakan di negara-negara maju, pemilu yang berulang-ulang dan praktek demokrasi yang relatif bersih, memungkinkan teori itu memiliki validitas tinggi untuk memprediksi perilaku pemilih untuk pemilu-pemilu berikutnya.

Untuk konteks Indonesia, terdapat perbedaan antara masa orde baru dan pasca orde baru, seperti iklim sosial politik yang berbeda antara kedua masa tersebut. Tapi bukan berarti hasil kajian pada masa sebelumnya sama sekali tidak bisa digunakan, mengingat hasil penelitian pada masa reformasi masih sangat terbatas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik menurut Surbakti (1992:16) adalah:

1. Lingkungan sosial politik taklangsung, seperti sistem politik, ekonomi, sistem kebudayaan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian masyarakat seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.

3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi masyarakat secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

Dari lingkungan sosial politik langsung masyarakat mengalami sosialisasi langsung dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Dimana faktor lingkungan sosial politik yang berupa sosialisasi internalisasi dan politisasi, selain itu faktor lingkungan sosial politik taklangsung juga mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Faktor lingkungan sosial berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian atau sikap perilaku pemilih.

Perilaku politik suatu masyarakat juga bisa dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur kekuasaan. Seorang pemimpin sebagai pemilik kekuasaan bisa mempengaruhi, bahkan menciptakan dan menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga para pengikut dapat mempengaruhi pemimpin yang diinginkan. Sebaliknya seorang pengikut dapat mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan, dan menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya (Hidayat, 2002: 44).

Diantara beberapa jenis pengelompokan sosial, agama merupakan salah satu faktor penting pembentukan perilaku memilih di Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan, agama pemilih memiliki korelasi nyata dengan perilaku memilih (Prihatmoko, 2005). Setiap orang yang mengaku beragama, akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok agamanya dan pilihan politiknya biasanya disejalankan dengan agama yang dianutnya. Studi tentang besarnya pengaruh agama, bisa saja menjadi hal yang kurang relevan lagi untuk masa sekarang ini. Tapi beberapa rujukan lain justru memperkuat bahwa agama menjadi variabel penting dalam membentuk perilaku memilih.

Selain orientasi agama, terdapat faktor sosial yang perlu mendapat perhatian yaitu usia dan jenis kelamin. Studi-studi tentang faktor usia dan jenis kelamin terhadap perilaku pemilih sangat penting dilakukan, jumlah kaum wanita yang lebih lima puluh persen dari total populasi merupakan proporsi yang menentukan hasil pemilu jika terdapat korelasi erat antara jenis kelamin dan pola pilihan.

Berbicara tentang korelasi antara jenis kelamin dengan pola pilihan, Ramlan Surbakti menjelaskan terdapat perbedaan perilaku politik perempuan dari pria baik pada peringkat warga negara maupun pada peringkat elit yang dijelaskan dengan perbedaan belajar mengenai *sex roles* dan *sex role* yang pantas dalam bidang politik pada masa kanak-kanak atau masa ini diartikan sebagai sosialisasi politik. Populasi perempuan yang melebihi setengah dari keseluruhan jumlah populasi merupakan suatu kajian

yang menarik, apalagi mekanisme yang ada yaitu legitimasi pada hasil pemilihan umum yang mensyaratkan suara mayoritas, menjadikan posisi perempuan ini menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Adanya perbedaan perilaku politik antara laki-laki dan perempuan, seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti, menjadikan faktor sosial ini perlu diperhatikan.

Faktor sosial lainnya yang perlu diperhatikan yaitu orientasi kandidat. Pengaruh orientasi kandidat terhadap pola perilaku dan pilihan politik tidak tampak pada pemilu-pemilu pada zaman orde baru, dengan sistem pemilu yang memilih partai, umumnya para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat melakukan pencoblosan.

Sistem yang ada pada masa orde baru, memang tidak menyediakan ruang untuk proses pencoblosan kandidat. Tapi pada masa yang lebih demokratis, maka hal ini dimungkinkan. Perilaku pemilih pada pemilu 1999, walaupun masih sistem pencoblosan lambang partai, dipengaruhi faktor kandidat. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang lebih demokratis akan membuka seluas-luasnya ruang kontestasi untuk setiap orang untuk “berkompetisi” sesuai dengan aturan yang ada (Mufti. 2005).

Pada pemilu 2009 dengan sistem pemilihan tanda gambar partai dan nama kandidat, faktor kandidat legislatif akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku memilih, terlebih-lebih pada pemilihan presiden dengan sistem pemilihan langsung. Terdapat bangunan kognitif yang digunakan oleh pemilih untuk menilai seseorang yang akan maju sebagai calon atau

kandidat, sehingga faktor kandidat sangat berpengaruh terhadap pola pilihan pemilih.

Adnan Nursal (2004:37) menguraikan sejumlah orientasi pemilih dalam ajang pemilihan umum, antara lain :

1. *Sosial imagery* atau citra sosial (pengelompokan sosial), menunjukkan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antar kandidat atau partai dengan segmen - segmen tertentu dalam masyarakat. *Sosial imagery* adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai “berada” didalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik. *Sosial imagery* dapat terjadi berdasarkan banyak faktor antara lain :
  - a. Demografi
    - 1) Usia (contoh : partai anak muda)
    - 2) Gender (contoh : calon pemimpin dari kelompok hawa)
    - 3) Agama (contoh : partai bercorak Islam, Katolik)
  - b. Sosio ekonomi
    - 1) Pekerjaan (contoh : partai kaum buruh)
    - 2) Pendapatan (contoh : partai wong cilik)
  - c. Kultur dan etnik
    - 1) Kultur (contoh : kandidat adalah seniman, santri)
    - 2) Etnik (contoh : orang Jawa, Sulawesi)
  - d. Politis-ideologi (contoh : partai nasionalis, partai agamis, partai konservatif, partai moderat).

2. Identifikasi partai, bisa menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan politik sesuai dengan kedekatan terhadap suatu partai yang dihubungkan dengan kandidat.
3. Identifikasi kandidat
  - a. *Emosional feelings*, dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh *police making* yang ditawarkan.
  - b. *Kandidat personality*, mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
4. Isu dan kebijakan politik, pengaruh isu dan program bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku pemilih. Semakin tingginya pendidikan pemilih, yang bisa meningkatkan daya kritis, semakin menyebabkan pentingnya peranan isu dan program.
5. Peristiwa-peristiwa tertentu
  - a. *Current events*, mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
  - b. *Personal events*, mengacu pada peristiwa pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat. Misalnya, skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim, pernah ikut berjuang dan lain-lain.
6. *Epistemic*, adalah isu-isu pemilihan yang spesifik dimana dapat memicu keingintahuan pemilih mengenai hal-hal tertentu.

Selanjutnya Lipset (2007:181) juga mengemukakan, perilaku pemilih akan dipengaruhi oleh struktur sosial seorang individu, seperti kelompok politik dan sistem politik yang melekat pada individu berdasarkan etnis, agama, atau sistem ekonomi regional.

Kemudian Upe (2008:205) menurut hasil penelitiannya menyimpulkan terdapat enam variabel atau faktor sebagai stimulus politik yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih kandidat, antara lain :

1. Identifikasi *figure*

Dalam proses Pemilihan Anggota Legislatif disebut juga sebagai pemilihan perorangan, hanya saja proses pencalonan melalui seleksi partai politik yang memiliki persentase kursi legislatif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan saat ini sudah dimungkinkan pencalonan diluar partai atau lebih dikenal dengan calon *independent*. Oleh sebab itu, harapan dari momentum ini adalah terpilihnya figur yang berkualitas, sehingga mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik, tentu dengan melihat sosok calon pemimpin yang berkemampuan dan profesional.

2. Identifikasi partai politik yang mengusung

Secara sosiologis ada kemungkinan faktor ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Dimana pemilih mengaitkan pilihannya dengan kelompok sosialnya, dalam hal ini partai politik.

### 3. Isu kampanye

Kampanye merupakan proses penyampaian program dari masing-masing pasangan calon melalui pesan-pesan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku pemilih.

### 4. Faktor juru kampanye

Juru kampanye yang dimaksud yakni siapa saja yang aktif menyampaikan program-program pasangan calon, baik pada saat kampanye maupun diluar kampanye. Tentu saja para juru kampanye tersebut memiliki ikatan yang lebih dekat dengan konstituen di sekitar mereka.

### 5. Pertimbangan insentif (hibah politik)

Fenomena menarik dalam Pemilihan Anggota Legislatif adalah maraknya kapitalisme Pemilihan Anggota Legislatif . Pertama, sebuah partai memiliki kewenangan untuk menuntut kontribusi kepada partai politik yang akan mengusungnya. Kedua, dalam kondisi pemilih yang masih sangat terbatas baik aspek ekonomi maupun politik, bisa dimanfaatkan para pihak kandidat untuk mendapatkan suara, dalam hal ini disebut hibah politik.

### 6. Faktor kelompok penekan (*pressure group*)

Ajang Pemilihan Anggota Legislatif merupakan sebuah ajang demokratis, namun juga tidak menuup kemungkinan terjadinya praktek premanisme atau apapun bentuknya yang menekan pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Selainitu juga ada tekanan dari kelompok dimana masing-masing individu berada seperti keluarga, pertemanan, lingkungan pekerjaan dan sebagainya.

## 2.6 Tipe Perilaku Pemilih

Popkin dalam Nursal (2004:37) membedakan antara pilihan politik sebagai wujud perilaku politik dengan pilihan pribadi terhadap produk-produk konsumtif sebagaimana dalam perilaku ekonomi. Menurutnya ada empat hal yang membedakan perilaku tersebut. *Pertama*, memilih kandidat politik, secara tidak langsung dirasakan manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap produk konsumtif, melainkan manfaatnya diperoleh di masa depan. *Kedua*, pilihan politik merupakan tindakan kolektif dimana kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Jadi pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. *Ketiga*, pilihan politik senantiasa diperhadapkan dengan ketidakpastian utamanya untuk memenuhi janji politiknya. *Keempat*, pilihan politik membutuhkan informasi yang intensif demi tercapainya manfaat dimasa depan.

Kemudian juga, secara umum tipe perilaku pemilih sebagaimana yang dikemukakan oleh Newman dalam Nursal (2004:126). Terdiri atas segmen-segmen sebagai berikut :

1. Segmen pemilih rasional

Yaitu kelompok pemilihan yang memfokuskan perhatiannya pada faktor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihan politiknya.

2. Segmen pemilih emosional

Yaitu kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu seperti kesedihan, kekhawatiran, dan kegembiraan terhadap

harapan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya. Faktor emosional ini sangat ditentukan oleh personalitas kandidat.

### 3. Segmen pemilih sosial

Yaitu kelompok pemilih yang mengasosiasikan kontestan dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.

### 4. Segmen pemilih situasional

Yaitu kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.

Selanjutnya Nimmo dalam Upe (2008:112) menurunkan pemberian suara ke dalam empat alternatif tindakan yakni :

#### 1. Pemberian suara rasional

Tindakan pemberi suara yang rasional memperhitungkan cara atau alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemberi suara yang rasional selalu dimotivasi untuk bertindak jika dihadapkan pada pilihan politik, disamping itu, berminat secara aktif terhadap politik, sehingga memperoleh informasi. Pemilih rasional cukup pengetahuan mengenai berbagai alternatif, bertindak berdasarkan prinsip bukan secara kebetulan atau kebiasaan. melainkan bertindak dengan mempertimbangkan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Pemilih rasional cenderung memilih alternatif yang peringkat preferensinya paling tinggi.

## 2. Pemberian suara reaktif

Bersumber dari asumsi fisikalistik bahwa manusia bereaksi terhadap rangsangan dengan cara pasif dan terkondisi terhadap kampanye politik oleh partai dan kandidat yang menyajikan isyarat dengan maksud menggerakkan arah perilaku pemilih dalam memberikan suara. Ikatan emosional kepada partai politik merupakan konstruk yang paling penting yang menghubungkan pengaruh sosial dengan pemberian suara bagi pemilih yang reaktif. Sumber utama aksi dari pemberi suara yang reaktif yaitu sekedar mengasosiasikan lambang partai dengan nama kandidat mendorong mereka yang mengidentifikasikan diri dengan partai atau kandidat untuk mengembangkan citra yang lebih menguntungkan tentang catatan dan pengalamannya, kemampuannya dan atribut personalnya. Oleh karena itu, identifikasi dengan partai meningkatkan tabir perseptual yang melalui tabir itu individu melihat apa yang menguntungkan bagi kepartaiannya.

## 3. Pemberi suara responsif

Yaitu pemberi suara yang inpermanen, berubah mengikuti waktu, peristiwa, politik dan pengaruh yang berubah-ubah terhadap pilihan para pemberi suara. Terdapat perbedaan antara pemberi suara responsif dengan reaktif antara lain, 1) meski suara responsif dipengaruhi oleh karakter sosial dan demografis mereka, pengaruh yang pada hakikatnya merupakan atribut yang permanen ini tidak deterministik. 2) pemberi suara responsif memiliki kesetiaan terhadap partai, tetapi afiliasi ini tidak menentukan

perilaku pemilihan karena ikatan kepada partai tidak emosional. 3) pemberi suara yang responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek yang penting dalam pemilihan umum, ketimbang oleh kesetiaan jangka panjang kepada kelompok atau kepada partai. Pemberi suara yang responsif bukanlah gambaran pemilih yang dibelenggu oleh determinan sosial atau didorong oleh alam bawah sadar yang dipicu oleh propaganis yang luar biasa terampilnya. Ia lebih merupakan gambaran tentang pemilih yang digerakan oleh perhatiannya terhadap masalah pokok dan relevan tentang kebijakan umum, tentang prestasi pemerintah dan tentang kepribadian eksekutif.

#### 4. Pemberi suara aktif

Manusia bertindak terhadap suatu objek yang dilihatnya, memberinya makna dan menggunakan makna itu untuk mengarahkan tindakannya. Bila pandangan demikian, individu yang aktif itu menghadapi dunia yang harus diinterpretasikan dan diberi makna untuk bertindak bukan hanya lingkungan pilihan yang telah diatur sebelumnya, yang terhadapnya orang menanggapi karena sifat atribut dan sikap individu atau jangkauan rangsangan yang terbatas. Keterlibatan aktif mencakup orang yang menginterpretasikan peristiwa, isu, partai dan personalitas. Dengan demikian menetapkan dan menyusun maupun menerima serangkaian pilihan yang diberikan.

Kemudian Upe (2008:255) berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dari berbagai varian stimulus politik yang menjadi motivasi pemilih

menentukan pilihannya, ternyata dapat disatukan oleh visi misi pemilih itu sendiri. Faktor atau variable yang dapat dijadikan sebagai kategorisasi pemilih pada pola yang sama adalah masalah waktu pencapaian tujuan.

Stimulus politik tidak secara langsung mempengaruhi perilaku politik melainkan terlebih dahulu melewati atau melalui variabel antara yakni visi misi pemilih yang menjadi pertimbangan utama dalam mencapai tujuan politiknya yang dalam penelitian ini disebut sebagai rasionalitas diakronik.

Sintesa teoritis yang didasarkan pada realitas *locus* penelitian menurut Upe (2008 :255) menunjukkan bahwa, perilaku politik pemilih mencirikan model diakronik, yaitu rasionalitas perilaku pemilih dengan mempertimbangkan jangka waktu pencapaian tujuan. Derajat rasionalitas tersebut tersusun dalam tiga rentang waktu, yakni rasionalitas retrospektif, rasionalitas pragmatis-adaptif, dan rasionalitas prospektif.

#### 1. Model rasional retrospektif

Yaitu kemampuan pemilih untuk memilih berdasarkan penilaiannya pada penampilan kontestan pada masa yang lalu. Perilaku memilih retrospektif (*retro, spektif, voting*) tidak ubahnya seperti memberikan ganjaran atau hukuman kepada kontestan. Rasionalitas retrospektif diarahkan pada figur dan partai politik. Dalam artian, *reward* maupun *punishment* diarahkan pada kandidat, parpol mengusung, dan juru kampanye.

## 2. Model rasionalitas pragmatis-adaptif

Tipe rasionalitas ini didasarkan atau disesuaikan pada stimulus politik yang muncul pada momen pemilihan. Perilaku pragmatisme-adaptif muncul akibat pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar “isapan jempol” akhirnya mendorong pemilih menjadi pragmatis (*pragmatic voting*). Belum lagi adanya anggapan siapapun yang berkuasa tidak akan mampu melakukan perubahan signifikan. Rasionalitas model ini tidak mengikuti tradisi model prospektif (masa depan) dan tidak pula didasarkan pada model retrospektif (pandangan masa lalu). Melainkan sifatnya fleksibel dan kondisional. Atau dengan kata lain model pragmatis-adaptif, yaitu perilaku pemilih yang diorientasikan pada waktu sekarang, pemilih hanya semata melihat kepentingan sesaat.

## 3. Model rasionalitas prospektif

Model rasionalitas yang dimaksud adalah perilaku pemilih yang didasarkan pada orientasi masa depan yang lebih panjang (*prospective voting*). Perilaku pemilih dalam model prospektif dalam menentukan pilihannya didasarkan pada visi misi kandidat, rekam jejak kandidat (*track record*), integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan. Motivasi utama atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemilih dari pemberian suaranya pada salah satu pasangan calon yaitu menginginkan pemimpin yang benar-benar dengan dianggap kapabel dalam menjalankan roda pemerintahan yang *good governance and clean governance*. Rasionalitas perilaku pemilih paling tinggi berdasarkan semangat dan makna Pemilihan

Anggota Legislatif . Dimana pemilih tipe ini adalah pemilih yang aktif mengakses dan mencari informasi-informasi tentang apa yang akan dilakukannya.

## **2.7 Pendekatan Perilaku Pemilih**

Dalam Asfar (2006:112) menyatakan bahwa terdapat tiga macam atau dasar pemikiran yang berusaha menerangkan perilaku pemilih, atau dalam istilahnya Roth disebut perilaku pemilu. Ketiganya tidak sepenuhnya berbeda, dan dalam beberapa hal ketiganya bahkan saling membangun/mendasari, serta memiliki urutan kronologis yang jelas. Pendekatan ini terletak pada titik beratnya : model sosiologis untuk menerangkan perilaku pemilu, model psikologi sosial dan model pilihan rasional.

### **1. Pendekatan sosiologis atau sosial struktural**

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan pemilih. Bahwa pendekatan sosiologi atau lebih tepatnya pendekatan sosial struktural untuk menerangkan perilaku pemilu, secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan penjelasan makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis lebih dikenal dengan sebutan mazhab Columbia (*Columbia school*). Sedangkan model penjelasan makrososiologis dari Seymour Martin Lipset dan Stein Rokkan, didasarkan atas pengamatan perilaku pemilu lazarsfeld. Model ini menelaah perilaku pemilu diseluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya Roth mengatakan dasar model penjelasan mikrososiologis berasal dari teori lingkaran sosial yang diformulasikan oleh George Simmel (1890) pada akhir abad lalu. Menurut teori ini setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dan sebagainya. Sedangkan model penjelasan makrososiologis, mengacu kepada konflik-konflik mendasar yang biasanya muncul di masyarakat, yang kesetimbangannya perlu dipertahankan dalam sebuah demokrasi. Biasanya status sosial struktural dilakukan dengan melihat keanggotaan seseorang dalam berbagai kelompok profesi yang ada. Secara keseluruhan, pendekatan sosial struktural dapat memberikan penjelasan yang sangat baik mengenai perilaku pemilu yang konstan. Namun tetap tidak dapat memberikan penjelasan mengenai penyebab pindahnya seorang individu ke partai (pilihan) politik lain.

## 2. Pendekatan sosial psikologis

Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi kepribadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Sementara pendekatan pemilu dari *Columbia School* lebih mengaitkan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan dimana individu tersebut bernaung. Maka sekelompok ahli-ahli ilmu sosial dari University Of Michigan di Ann Arbor lebih menempatkan sang individu itu sendiri sebagai pusat perhatian mereka. Menurut Ann Arbor School, persepsi dan

penilaian pribadi terhadap sang kandidat atau tema-tema yang diangkat (pengaruh jangka pendek) sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu yang diutamakan selain itu, “keanggotaan psikologis” dalam sebuah partai yang dapat diukur dalam bentuk variabel identifikasi partai, turut mempengaruhi pilihan pemilu. Hal mana merupakan hasil berbagai pengaruh jangka panjang. Oleh karena itu, keputusan pemilumasing-masing individu secara primer tidak ditentukan secara sosial struktural. melainkan lebih merupakan hasil pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap sang individu.

Pendekatan sosial psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan pemilu yang diambil dalam waktu yang singkat Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinin yakni identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Sebagaimana yang dikemukakan Campbell bahwa pendekatan sosial psikologis, membedakan antara kekuatan, arah dan intensitas orientasi, baik dalam orientasi isu, maupun orientasi kandidat. Dimana tema-tema khusus itu hanya dapat mempengaruhi perilaku pemilu individu apabila memenuhi tiga persyaratan dasar ; tema tersebut harus ditangkap oleh pemilih, tema tersebut dianggap penting oleh pemilih, dan pada akhirnya pemilih harus mampu menggolongkan posisi pribadinya (baik secara positif maupun negatif) terhadap pemecahan konsep yang ditawarkan oleh sekurang-kurangnya satu partai. Apabila dilihat secara keseluruhan maka

pendekatan sosial psikologis dapat memberikan tambahan yang berarti kepada model penjelasan sosial struktural bagi perilaku pemilu. Dengan demikian, maka pengaruh jangka pendek harus dapat dipertimbangkan dalam menilai perilaku pemilu. Terutama dalam menjelaskan perilaku pemilu yang berubah-ubah.

### 3. Pendekatan rasional

Melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, berdasarkan pertimbangan rasional yang paling menguntungkan. Pusat perhatian berbagai pendekatan teoritis mengenai perilaku pemilu yang rasional terletak pada perhitungan biaya dan manfaat. Menurut pendekatan ini, yang menentukan sadar sebuah pemilu bukannya karena adanya sebuah ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan penilaian warga rasional yang cakap, melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya pemilih sebagai aktor dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dengan demikian pemilih rasional tidak hanya memilih alternatif yang paling menguntungkan atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga memilih alternatif yang dianggap menimbulkan resiko yang kecil dan mendahulukan selamat. Disini para pemilih dianggap mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan, begitu juga mampu menilai calon yang ditampilkan. Secara sederhana

pendekatan ini memiliki langkah-langkah dalam menentukan pilihannya. Pertama, kalkulasi keuntungan yang diperoleh untuk masing-masing kemenangan kandidat. Kedua, memuat urutan kandidat yang paling menguntungkan hingga yang paling tidak menguntungkan. Ketiga, menentukan pilihan kepada yang paling menguntungkan (Asfar, 2006:112).

Penerapan pendekatan rational dalam ilmu politik salah satunya adalah untuk menjelaskan perilaku memilih suatu masyarakat terhadap kandidat atau partai tertentu dalam konteks pemilu. Teori pilihan rasional sangat cocok untuk menjelaskan variasi perilaku memilih pada suatu kelompok yang secara psikologis memiliki persamaan karakteristik. Pergeseran pilihan dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dan status sosial yang sama tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis maupun psikologis. Dua pendekatan terakhir tersebut menempatkan pemilih pada situasi dimana mereka tidak mempunyai kehendak bebas karena ruang geraknya ditentukan oleh posisi individu dalam lapisan sosialnya (Saiful Mujani dkk, 2012).

## **2.8 Defenisi Pemilihan Legislatif**

Pemilihan Legislatif merupakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus Negara sebagaimana diatur dalam UU tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD atau badan legislatif ini adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota dari badan legislatif yang baru mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna.

Mekanisme pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta Pemilu dan mencoblos salah satu calon di bawah tanda gambar partai politik peserta Pemilu, sedang untuk DPD langsung mencoblos pada tanda gambar calon yang bersangkutan. Namun meskipun system Pemilu sudah dilakukan perubahan, dari sistem proposional dengan daftar calon tertutup (tanpa daftar calon) ke system proposional dengan daftar calon terbuka, ternyata belum memberikan adanya perubahan yang berarti. Selain itu sikap apatis dari masyarakat secara umum masih menonjol, ini bila dicermati terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2004 kemarin.

Menurut Budiardjo badan legislatif adalah lembaga yang *legislate* atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai adalah *parliament* (parlemen).

Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuat mencerminkan

kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dapat dikatakan bahwa badan legislatif merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

## **2.9 Kerangka Pikir**

Perilaku politik merupakan suatu produk sosial yang tidak hadir begitu saja. Berbagai faktor dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat dapat menjadi variabel yang sangat berpengaruh. Perilaku politik dan pilihan politik terkait sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keikutsertaan seseorang dalam hal ini dapat sebagai warga negara biasa maupun sebagai pengambil keputusan. Dalam penelitian ini, fokusnya pada perempuan sebagai warga negara yang ikut dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yaitu proses pemilihan umum anggota legislatif pada tahun 2014. Dalam proses ini, perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki karakteristik dalam perilaku politik. Perilaku politik perempuan mencakup pilihan-pilihan politik seperti keikutsertaan dalam pemungutan suara dan pilihan terhadap kandidat yang ada. Pilihan politik perempuan ini, dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sosial, dan diuraikan dalam tulisan ini.

Tindakan memilih adalah sebuah tindakan sosial. Tindakan tersebut diartikan sebagai sebuah tanggapan/output terhadap situasi sosial/input yang dihadapkan kepada aktor. Dalam hal ini tanggapan terhadap Pemilihan Anggota Legislatif . Situasi sosial akan diinternalisasikan oleh aktor kedalam

diri aktor. Yang mana outputnya akan ditentukan/tergantung pada faktor sifat alami yang ada dalam aktor dan faktor intervensi yang datang kepada aktor.

Faktor-faktor tersebut *pertama* sifat alami aktor, terdiri atas dirinya sendiri dan lingkungannya. Aktor sebagai makhluk individu memiliki pengetahuan akan situasi sosial yang terjadi, dan aktor sebagai makhluk sosial akan dipengaruhi oleh lingkungannya. *Kedua*, faktor yang juga turut menentukan adalah intervensi yang didatangkan pada aktor dari pihak kandidat, yang secara emosional akan mempengaruhi keputusan tindakan memilihnya.

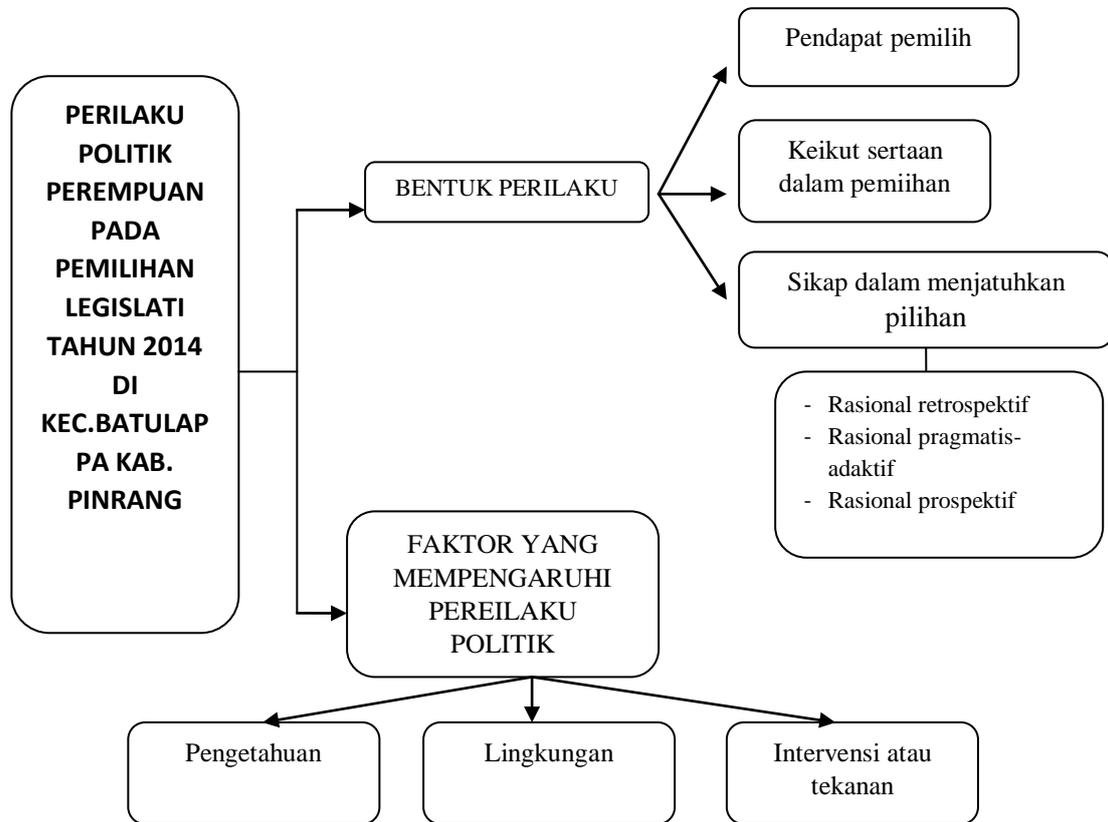
Faktor-faktor tersebut masuk kedalam diri aktor dimana didalamnya akan terjadi proses internalisasi atas input/situasi sosial yang terjadi. Kemudian akan melahirkan sebuah output/tindakan yakni memilih salah satu pasangan kandidat. Tindakan memilih tersebut diartikan sebagai sebuah model tindakan rasionalitas diakronik. Dimana tindakan memilih tersebut diartikan sebagai sebuah tindakan yang berorientasi pada waktu pencapaian tujuan, yang terbagi kedalam tiga rentan waktu yakni, model rasionalitas retrospektif, rasionalitas pragmatis-adaptif ataukah model rasionalitas prospektif.

Penelitian ini ingin melihat sejauh manakah tindakan tersebut dilakukan. Apakah menunjuk kepada tindakan yang rasional atau tidak rasional yang dilihat dari perspektif individu yang melakukannya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka berpikir di bawah :

Gambar 1.

## Bagan Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods atau metode penelitian campuran, namun peneliti lebih menekankan pada data kuantitatif dan data kualitatif hanyalah sebagai data penunjang. Penelitian ini adalah suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Craswell (2010:5), penelitian campuran merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Menurut pendapat Sugiyono (2011:404) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

#### **3.2 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hal ini tentu telah dilakukan pengamatan sebelumnya tentang tingkat perilaku politik perempuan, partisipasi politik serta rasio pemilih laki-laki dan perempuan yang jauh berbeda pada saat pemilihan anggota legislative tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Pinrang, sementara itu Kecamatan Batulappa

juga memiliki karakter masyarakat yang sangat kreatif sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian.

### **3.3 Populasi dan sampel**

#### **3.3.1 Populasi Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandar rumidi, 2006:47). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga perempuan yang mempunyai hak pilih pada pemilihan anggota legislative tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yaitu 3.967 orang.

#### **3.3.2 Sampel Penelitian**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Sugiyono (2008: 118).

Dalam penelitian ini ada dua jenis sampel yaitu sampel penelitian kuantitatif biasa disebut Responden dan sampel penelitian Kualitatif atau

biasa disebut Informan. Adapun jumlah sampel Kuantitatif dalam penelitian ini adalah sebanyak seratus (100) orang.

### 3.3.2.1 Menentukan Ukuran Sampel kuantitatif

Untuk menentukan ukuran sampel (teknik sampling) dalam penelitian ini maka penulis menggunakan rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut:

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

di mana :

n = ukuran sampel N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%.

$$= \frac{3.967}{1+3.967 (0,10)^2}$$

$$= \frac{3.967}{1+ 3.967 \times 0,01}$$

$$= \frac{3.967}{40,67}$$

$$= 97,54 \text{ dibulatkan } 100$$

Jumlah populasi/DPT Perempuan di Kecamatan Batulappa sebanyak 3.967 jiwa (N), Margin error (e) adalah 10% atau (0,1) maka n atau jumlah sampel yang ditentukan adalah 100 Responden. Berdasar

data jumlah penduduk di 5 Desa/kelurahan lokasi survei, masing-masing survei dibagi rata yaitu 20 Responden. Maka, didapatkan kisaran survey sebanyak 100 Responden di seluruh wilayah Kecamatan Batulappa. Besaran 100 Responden tersebut tersebar di 5 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Batulappa.

### **3.3.2.2 Penentuan Responden**

Penentuan Responden dilakukan secara acak (Random) dengan metode *Probability Sampling* Pada pengambilan sampel secara random, setiap unit populasi, mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Dengan cara random, bias pemilihan dapat diperkecil sekecil mungkin. Ini merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Dalam menentukan Responden pada penelitian ini, peneliti mendaftarkan semua Desa/ Kelurahan yang akan menjadi sampel penelitian, namun karena hanya ada 5 Desa/ Kelurahan yang ada di Kecamatan Batulappa tersebut maka peneliti memutuskan untuk menjadikan semua Desa/Kelurahan sebagai sampel dengan membagi lima dari 100 Responden, sehingga masing-masing Desa/Kelurahan mendapatkan 20 Responden.

Selanjutnya untuk mendapatkan 20 Responden setiap Desa/Kelurahan, peneliti menggunakan metode acak sederhana yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan

acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi beberapa hal, yaitu :

#### **3.4.1 Observasi**

Dalam observasi ini peneliti hanya mendatangi lokasi tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif, namun hadir dalam konteksnya. Mengamati kondisi benda atau lokasi tertentu, bisa merupakan usaha pemantapan makna mengenai pemakaian atau pemanfaatan yang berkaitan dengan peristiwa yang ada hubungannya dengan sesuatu tersebut (Sutopo,2002 : 66).

Observasi langsung ini akan dilakukan tidak hanya sekali baik secara formal dan informal, untuk mengamati berbagai kegiatan di lokasi penelitian. Dengan kegiatan ini peneliti dapat melihat langsung situasi dan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian akan diperoleh informasi yang lebih objektif dan realistis. Sasaran yang akan diobservasi adalah calon informan, sekaligus sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

#### **3.4.2 Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu. Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan.

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini, diperlukan teknik wawancara, yakni dalam bentuk wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yang merupakan wawancara tidak terstruktur, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open-ended”, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh dan mendalam (Sutopo, 2002:58).

Maksud dilakukan wawancara mendalam dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi yang lengkap mengenai perilaku politik perempuan pada pemilihan Legislatif 2014. Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan demikian dalam pelaksanaannya bahan atau materi wawancara tidak keluar dari konteks yang semestinya.

Menurut Moleong (2006: 199) persiapan wawancara tak terstruktur dapat diselenggarakan menurut tahap-tahap tertentu. Tahap pertama ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai. Barangkali pada saat pilihan

hanya berkisar di antara beberapa orang yang memenuhi persyaratan. Pada dasarnya masalah penelitianlah yang membimbing pewawancara untuk menentukan responden yang diwawancarai.

Langkah kedua ialah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan responden. Karena Informan adalah orang-orang pilihan, dianjurkan agar jangan membiarkan orang ketiga menghubungi, tetapi peneliti sendiri yang melakukannya. Langkah ketiga ialah mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara. Kegiatan wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku atau perekam untuk mencatat atau merekam keterangan yang diperlukan dari responden atau informan.

#### 3.4.3 Kuesioner / Angket

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti (Narbuko, dkk, 2005:76). Menurut Arikanto (2006) Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dari pernyataan diatas, jadi Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada sekelompok orang mengenai suatu masalah sehingga mendapatkan informasi tentang masalah tersebut.

#### 3.4.4 Studi dokumenter

Studi dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan (Moleong (2006: 217). Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo,2002: 69).

Teknik ini akan digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip Pemilu 2014 yang terdapat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, sebagai data pendukung penelitian.

### **3.5 Penentuan Informan**

Informan dalam penelitian ini, adalah orang-orang atau pihak yang dinilai dapat memberikan informasi dan data seakurat mungkin. Penelitian tentang perilaku politik perempuan tidak harus memilih informan dari perempuan saja, melainkan dari laki-laki juga yang tentunya dapat memberikan informasi yang akurat .Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga keobyektifan data dan informasi, sehingga informan yang dipilih terdiri dari laki-laki dan perempuan. Polarisasi dari informan yang dipilih terdiri dari :

1. pemerintah
2. panitia pemilihan
3. tokoh masyarakat
4. Ibu Rumah Tangga

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nama informan berdasarkan umur dan jenis kelamin

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	pekerjaan
1.	M. Rusli, S. sos	57	Laki-laki	Camat Batulappa
2.	Muh. Takdir, S. Ag	41	Laki-laki	PPK Kecamatan
3.	Sitti Amina	46	Perempuan	Tokoh perempuan
4.	Hasni	37	Perempuan	Wiraswasta
5.	Herna	30	Perempuan	Guru
6.	Wahida	36	Perempuan	Wiraswasta
7.	Muliana	28	Perempuan	Wiraswasta
8.	Bogel/Amran	35	Laki-laki	Tokoh Pemuda
9.	Walid Sanjata	33	Laki-laki	Politisi
10.	Darma	38	Perempuan	Wiraswasta
11.	Nur Haya	40	Perempuan	Tokoh Perempuan

### 3.6 Analisis Data

Sugiyono (2012:147) menyebutkan bahwa teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistic. Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik statistikdeskriptif. Menurut Sugiyono (2012:148) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

#### 3.1.1. Uji Validitas

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data perlu dilakukan pengujian validitas. Hal ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dari instrumen yang valid. Menurut Sugiyono (2012:121) “hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan anantara data yang

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti”. Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi bivariante antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

### 3.1.2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2012:121) “instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.” Setelah instrumen di uji validitasnya maka langkah selanjutnya yaitu menguji reliabilitas. Adapun pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang: disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
2. *One Shot* atau pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ).

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pengukuran reliabilitas cara kedua yaitu *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS untuk uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Hasil dari uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) akan

menentukan instrument yang digunakan dalam penelitian ini reliabel digunakan atau tidak.

### 3.1.3. Analisis Hipotesis

Adapun untuk menjawab pertanyaan hipotesis yaitu penerapan sanksi administratif efektif dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pemustaka di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kabupaten Banyumas dalam mengembalikan bahan pustaka menggunakan perhitungan distribusi frekuensi dengan menghitung mean dan standar deviasi untuk dibandingkan dengan kurva normal. Menginprestasikan hasil keusioner dengan kriteria ideal teoritik, sehingga akan diperoleh efektivitas sanksi administratif keterlambatan pengembalian bahan pustaka terhadap kedisiplinan pemusta di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kabupaten Banyumas.

## **3.7 Defenisi Konseptual dan Operasional**

### 3.7.1 Defenisi Konseptual

- Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu (Meriam Budiardjo, 2007).
- Perilaku politik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat,

kebijakan untuk mencapai suatu tujuan serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Perilaku politik ini diarahkan pada pencapaian konsensus atau kesepakatan dalam mewujudkan tujuan dari masyarakat dan pemerintah (Sudijono Sastroatmodjo, 1995).

- Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan memengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan akan tanggung jawab dan kesadaran mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara. Sementara itu, Syarbaini mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin Negara, atau upaya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.

### 3.7.2 Defenisi Operasional

- Politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial, Negara, kekuasaan, kedaulatan hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan sosial dan lain-lain.

- Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti ikut dalam partai politik, pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sedangkan sikap politik yang dikemukakan oleh Fadillah Putra adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses

Secara bebas perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik. Sebagaimana dijelaskan bahwa lingkup budaya politik meliputi pola orientasi individu yang diperoleh dari pengetahuan yang luas dan sempitnya orientasinya dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, keterlekatan maupun penolakan, serta orientasinya yang bersifat menilai terhadap obyek dan peristiwa politik.

Jika dikaitkan dengan Pemilu-legislatif, warga negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan negaranya dan warga negara lainnya. Perilaku politik dalam pemilu selanjutnya disebut perilaku memilih. Karena warga negara biasa memiliki hak untuk memilih dan hak untuk tidak menjatuhkan pilihan politiknya.

- Pilihan Politik dalam hal ini adalah sikap dan perilaku politik yang ditampilkan oleh masyarakat pemilih perempuan pada saat Pemilihan Anggota Legislative pada tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, dimana setiap individu memiliki pilihan masing-masing dalam menjatuhkan pilihan politiknya yaitu antara memilih calon legislative dari perempuan atau laki-laki dan bahkan tidak memilih sama sekali.
- Partisipasi politik dalam penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dalam pemberian suara indikatornya meliputi: Terdaftar sebagai pemilih tetap dan Penggunaan hak suara, diskusi masalah politik, menjadi petugas/tim kampanye dan lain-lain.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATULAPPA**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Batulappa**

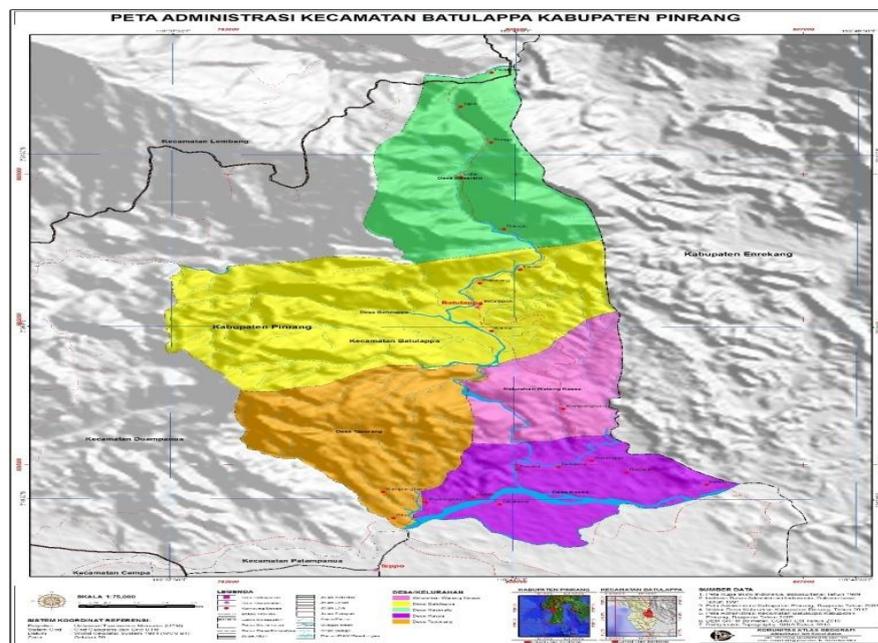
Kecamatan Batulappa merupakan Kecamatan termuda dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, terbentuk pada tahun 2000 silam, Kecamatan Batulappa merupakan pemekaran dari dua Kecamatan sebelumnya yakni Kecamatan Lembang dan Kecamatan Patampanua, dari sisi kesejarahan Kecamatan Batulappa memiliki kekayaan sejarah karena ada dua kerajaan besar yang berada di Kecamatan ini yaitu Kerajaan Batulappa sendiri dan kerajaan Kassa, kedua kerajaan besar ini sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kabupaten Enrekang sekarang), namun pada saat pembentukan Kabupaten Pinrang kedua kerajaan ini ditarik masuk wilayah Pinrang.

Kabupaten Pinrang, cikal bakalnya berasal dari Onder Ofdeling Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare. yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja yaitu KASSA, BATULAPPA, SAWITTO, dan SUPPA yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu(Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto), ini merupakan bagian dari adu domba Kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi Selatan.

#### 4.1.2 Letak Geografis

Kecamatan Batulappa adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Enrekang. Jarak rata-rata Kecamatan ini dari ibu kota Kabupaten adalah 45 km. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Patampanua dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang.

#### Peta Wilayah Kecamatan Batulappa



Kecamatan ini memiliki luas wilayah 158,99 km<sup>2</sup>. Wilayah terluas adalah Desa Batulappa dengan luas 36,90 km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah paling kecil adalah Desa Tapporang dengan luas wilayahnya 26,34 km<sup>2</sup>. Kecamatan ini tidak memiliki daerah pantai. Semua kelurahan di Kecamatan Batulappa berada di ketinggian kurang dari 500 Meter dari permukaan air laut. Desa Kaseralau merupakan desa yang paling jauh jaraknya dari ibu kota kecamatan yaitu sekitar 25 km maupun jarak dari ibu kota kabupaten Pinrang sekitar 50

km. Sedangkan Desa Tapporang merupakan desa yang paling dekat hanya 17 km dari ibu kota Kabupaten Pinrang.

**Tabel 1.**  
**Luas, Jarak dari Ibukota, dan Ketinggian Kelurahan dari Permukaan Air Laut Keadaan Akhir Tahun 2014**

KECAMATAN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	DARI IBUKOTA KECAMATAN	DARI IBUKOTA KABUPATEN	KETINGGIAN DARI PERMUKAAN AIR LAUT
TAPPORANG	26,34	5	17	18
KASSA	31,34	1	21	25
WATANG KASSA	29,75	10	30	125
BATULAPPA	36,9	12	32	100
KASERALAU	34,5	25	50	250

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang 2015

#### 4.1.3 Demografi

Kecamatan Batulappa memiliki jumlah penduduk 9880 jiwa dengan kepadatan penduduk 62 jiwa/km<sup>2</sup>. Kelurahan Kassa merupakan kelurahan yang paling padat penduduknya yakni 108 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana sex ratio di kelurahan tersebut sekitar 94 dengan total penduduk 3394 jiwa, yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia asli.

**Tabel 2. Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk, Dirinci Tiap Kelurahan/Desa, Keadaan Akhir 2014**

Kelurahan/ Desa	Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan
Tapporang	384	1647	63
Kassa	793	3394	108
Watang Kassa	254	1089	37
Batulappa	382	1639	44
Kaseralau	497	2111	61
<b>Jumlah</b>	<b>2306</b>	<b>9880</b>	

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang 2015

Menurut keadaan akhir 2014, kelahiran di Batulappa lebih besar daripada kematian, dimana bayi yang lahir adalah sebanyak 57 jiwa dan penduduk yang meninggal berjumlah 22 jiwa. Dengan demikian angka kelahiran kasar atau *Crude Birth Rate* (CDR) adalah 5,77 yang berarti bahwa pada setiap 1000 orang penduduk ada 5 sampai 6 kelahiran bayi dalam waktu 1 tahun. Angka kematian kasar atau *Crude Death Rate* (CDR) adalah 2,22 yang berarti bahwa pada setiap 1000 orang penduduk ada 2 orang yang meninggal dalam waktu 1 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kecamatan Batulappa secara umum sudah cukup baik. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih kecil yaitu 27 sedangkan kelahiran bayi perempuan 30. Namun jumlah kematian penduduk laki-laki lebih besar yaitu 13 sedangkan kematian penduduk perempuan 9.

Di satu sisi jumlah kelahiran jauh lebih besar daripada kematian tetapi jumlah penduduk yang datang lebih banyak daripada penduduk yang pindah. Sehingga pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2014. Ratio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kecamatan Batulappa akhir tahun 2014 adalah 94,37 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Dari tabel di samping terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

#### **4.1.4 Pendidikan**

Dalam bidang pendidikan pada akhir tahun 2014, Kecamatan Batulappa sudah memiliki fasilitas pendidikan sebanyak 9 TK, 16 SD, 6 SLTP, dan 1 SMK. Jumlah guru Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 38 orang, dan 230 murid, sehingga, perbandingan guru dengan murid adalah sekitar 1 : 6. Jumlah Guru SD adalah 164 orang dan 1575 murid. Dengan ketersediaan guru tersebut, perbandingan guru dengan murid adalah 1 : 10. Jumlah guru SMP adalah 96 dan 574 murid sehingga perbandingan antara guru dengan murid di SMP sekitar 1 : 5. Jumlah Guru SMK adalah 28 orang dan 158 murid, sehingga perbandingan guru dan murid 1 : 5. Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas belum ada di Kecamatan Batulappa hanya Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi bagi penduduk yang berniat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi harus meninggalkan Kecamatan Batulappa. Untuk SMA yang terdekat ada di Kecamatan Patampanua, yakni SMU URUNG Patampanua.

#### **4.1.5 Kesehatan**

Dalam bidang kesehatan, di Kecamatan Batulappa sudah terdapat beberapa fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan. Di Kecamatan ini terdapat 4 Puskesmas/ Pustu, dan 17 Posyandu. Tenaga kesehatan yang terdapat di Kecamatan Batulappa hanya dukung bayi terlatih 11 orang. Selain fasilitas kesehatan, untuk menunjang kebugaran fisik masyarakat Batulappa, di Kecamatan ini tersedia beberapa fasilitas olahraga. Fasilitas olah raga yang tersedia antara lain sepak bola, bola voly, bulu tangkis, dan tenis meja.

Hal ini juga menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap olah raga cukup baik. Sarana olah raga ini selain bermanfaat bagi kesehatan fisik juga dapat menjadi sarana hiburan dan aktivitas tambahan bagi masyarakat. Diharapkan pula aktivitas olah raga ini dapat menjadi ajang untuk mengukir prestasi.

#### **4.1.6 Ekonomi**

Luasnya Lahan pertanian di Batulappa berupa sawah dan lahan kering yang merupakan sumber pokok perekonomian masyarakat batulappa. Sawah yang ada di Kecamatan Batulappa hampir semuanya adalah sawah tadah hujan. Dengan demikian pertanian padi sawah sebagian besar tergantung pada musim penghujan. Lahan sawah terluas ada di Desa Batulappa, sedangkan lahan sawah yang paling sempit ada di Desa Watang Kassa. Ternak yang dihasilkan di Kecamatan Batulappa antara lain sapi, kuda, kerbau, dan kambing. Hasil ternak terbanyak adalah sapi, yaitu 3036 ekor pada akhir tahun 2014. Untuk unggas, di Kecamatan Batulappa dihasilkan ayam buras, ayam ras, ayam kampung, itik dan itik manila. Hasil terbesar adalah ayam kampung, yaitu 75650 ekor pada akhir tahun 2014.

Selain itu ada juga sector ekonomi yang lain yaitu dibidang Perdagangan, dimana perdagangan merupakan kegiatan yang sangat vital dalam perekonomian, di mana barang barang yang dihasilkan oleh produsen sampai ketangan masyarakat yang membutuhkannya melalui perdagangan. Perdagangan ini dapat dilakukan di manasaja, namun ada tempat-tempat yang menjadi pusat perdagangan seperti pasar, toko, ataupun tempat lelang. Di

Kecamatan Batulappa terdapat 3 pasar umum/local tempat masyarakat melakukan kegiatan jual beli. Ketiga pasar itu antara lain 1 pasar terdapat di Desa Kassa, 1 pasar terdapat di Desa Batulappa dan 1 pasar terdapat di Desa Kaseralau. Usaha perdagangan yang ada mayoritas perdagangan eceran/kecil. Sektor perdagangan yang paling mendominasi adalah perdagangan eceran. Masing-masing pedagang eceran tersebar di Desa Tapporang sebanyak 30 pedagang, Kelurahan Kassa 32 pedagang, Desa Watang Kassa 25 pedagang, Desa Batulappa 32 pedagang, dan Desa Kaseralau 26 pedagang.

#### **4.1.7 Pemerintahan**

Secara administrasi, Kecamatan Batulappa terdiri dari 5 desa yang terbagi menjadi 11 dusun dan 1 kelurahan yang terbagi menjadi 4 lingkungan. Menurut status hukum desa, keseluruhan desa dan kelurahan di Kecamatan Batulappa berstatus definitif, tidak ada yang berstatus desa persiapan maupun UPT (Unit Permukiman Transmigrasi). Di desa/kelurahan telah ada lembaga-lembaga ketahanan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kreativitas. Lembaga-lembaga desa yang ada di Kecamatan Batulappa antara lain LKK/LKD (Lembaga Ketahanan Kelurahan/ Lembaga Ketahanan Desa), Pemuda dan PPA. Desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu desa swadaya atau desa terbelakang, desa swakarya atau desa berkembang, dan desa swasembada atau desa maju. Ada 4 desa/kel di Kecamatan Batulappa yang termasuk kategori desa swasembada atau desa maju. Desa swadaya merupakan desa yang kekurangan SDM atau tenaga kerja dan kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi desanya. Biasanya terletak

di wilayah terpencil, jauh dari kota, taraf kehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana prasarana penunjang yang mencukupi. Selebihnya, 1 desa termasuk kategori desa swakarya atau desa berkembang.

**Tabel 3.**  
**Pembagian Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Batulappa, Keadaan Akhir Tahun 2014**

<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>LINGKUNGAN</b>	<b>DUSUN</b>	<b>ORW</b>	<b>ORT</b>
TAPPORANG	-	3	6	10
KASSA	4	-	7	10
WATANG KASSA	-	3	3	6
BATULAPPA	-	2	4	8
KASERALAU	-	3	6	12
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>46</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang 2015

Desa swakarya adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarya belum banyak memiliki sarana dan prasarana. Biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarya masih sedikit yang berpendidikan tinggi. Sebagian besar masyarakatnya masih bermatapencarian utama sebagai petani di pertanian saja. Budaya gotong royong di desa swakarya masih terbina dengan baik. Instansi-instansi pemerintah menjalankan program-program pemerintah di Kecamatan Batulappa.

#### **4.2 Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kecamatan Batulappa**

Jumlah pemilih pada pemilihan legislative tahun 2014 di Kabupaten Pinrang sesuai dengan sebaran 12 Kecamatan Yang ada seperti yang tertuang

dalam berita acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) se-Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Daftar DPT Kabupaten Pinrang**

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH PEMILIH		TOTAL
		DESA	TPS	LK	PR	
1.	Batulappa	5	23	3.760	3.967	7.727
2.	Cempa	7	31	6.076	6.697	12.772
3.	Duampanua	15	90	16.590	17.910	34.500
4.	Lanrisang	7	39	6.907	7517	14.424
5.	Lembang	16	96	17.334	17.437	34.771
6.	Mattiri Sompe	9	66	11.188	11.990	23.178
7.	Mattiro Bulu	9	53	10.072	11.248	21.320
8.	Paleteang	6	72	12.819	13.772	26.591
9.	Patampanua	11	65	11.040	12.354	23.394
10.	Suppa	10	59	10.075	11.114	21.189
11.	Tiroang	5	39	7.493	7.926	15.419
12.	Watang Sawitto	8	10	19.935	21.564	41.499
	<b>Jumlah</b>	<b>108</b>	<b>733</b>	<b>133.388</b>	<b>143.396</b>	<b>276.784</b>

Sumber: KPU Kabupaten Pinrang

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Perilaku Politik Perempuan di Kecamatan Batulappa Pada Pemilihan Anggota Legislatif 2014**

Perilaku politik adalah pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, *lobbying*, kampanye dan demonstrasi). Berdasarkan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya maka pada bab ini akan dijelaskan aspek yang menyangkut persoalan perilaku pemilih dan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut.

##### **5.1.1 Tanggapan Pemilih Terhadap Politisi Perempuan**

Sejak Negara kita menjalankan system pemilihan langsung oleh rakyat, belum ada perubahan riil yang terlihat pada masyarakat terkhusus kepada masyarakat perempuan di desa-desa. Hal ini tentu harus mendapat perhatian besar oleh penyelenggara, karena pemilih perempuan lebih mendominasi dibanding pemilih laki-laki. Terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk ikut aktif secara langsung dalam dunia politik ternyata tidak disambut baik oleh semua perempuan khususnya perempuan di pedesaan salah satunya di Kecamatan Batulappa.

Sperti apa yang disampaikan oleh Hasni, salah satu Informan ia menyampaikan:

***“Kalau saya tidak adaji masalah laki-laki atau perempuan yang penting betul-betul mampu, cuman kalau harus memilih saya lebih pilih caleg laki-laki karena kalau perempuan bagusnya urus keluarga saja”***  
**(Hasil wawancara tgl. 23 juni 2016)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara caleg pria maupun wanita. Sebagaimana informan berpendapat bahwa calon Igislatif laki-laki dan perempuan sama saja, yang paling penting adalah kemampuan calon. Namun demikian kecenderungannya perempuan lebih menginginkan pria. Hal ini kemungkinan dikarenakan caleg perempuan yang ikut dalam bursa calon anggota legislative yang lalu bukan merupakan tokoh pilihan mereka. Penjelasan tersebut dikuatkan oleh data kuantitatif yang penulis peroleh dilapangan seperti berikut ini:

Tabel 1.  
 Pilihan Responden terhadap perwakilan di DPRD  
 berdasarkan jenis kelamin

Pilihan	Frequency	Percent
Laki-laki	68	68,0 %
Perempuan	32	32,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan data kuantitatif 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Responden menginginkan Caleg Laki-laki lebih mereka harapkan mewakili mereka di DPRD dibanding Caleg Perempuan, dimana dari 100 responden, sebanyak 68,0 % yang memilih Caleg Laki-laki dan hanya 32,0 % yang memilih caleg perempuan.

Lebih tegas lagi apa yang disampaikan oleh salah satu Informan, Darma (38 tahun) saat ditanya soal pandangannya terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, sebagai berikut:

*“Saya kurang sepakat kalau perempuan juga ikut dalam berpolitik kerana perempuan lebih banyak tugas rumatangganya dibanding laki-laki, perempuan mengurus anak-anak, mengurus dapur, mencuci, dan sebagainya. Intinya tidak bagus kelihatan kalau perempuan keluar urusan politik sementara suaminya tinggal dirumah” (Hasil wawancara tgl. 27 juni 2016)*

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap caleg Perempuan masih sangat rendah ketimbang caleg laki-laki.

Selanjutnya di tabel 2 menunjukkan angka yang hampir sama ketika penulis mencoba mempertanyakan bagaimana respon mereka jika perempuan terlibat dalam dunia politik, ternyata responden lebih dominan memilih tidak sepakat kalau perempuan terlibat. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 2  
Pendapat Responden tentang keterlibatan perempuan dalam politik

	Frequency	Percent
Setuju	24	24,0 %
Tidak Setuju	76	76,0%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan data kuantitatif 2016

Melihat table frekuensi diatas jelas bahwa sebanyak 76 responden atau 76,0 % yang menyatakan tidak setuju kalau perempuan ikut dalam

politik, dan hanya 24 responden atau 24,0 % yang menyatakan setuju. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu informan diatas.

Perspektif diatas sebenarnya sudah tidak efektif untuk saat ini tapi inilah kenyataan pada masyarakat bawah yang masih menjunjung pandangan lama, mereka belum memahami jelas bahwa politik itu cukup penting dalam kehidupan, mereka tahunya politik itu adalah hal yang kotor, politik itu disaat memilih calon baik legislative maupun eksekutif. Nilai-nilai seperti ini sudah terinternalisasi secara tanpa sadar pada diri para responden yang hidup dalam struktur social masyarakat awam.

Berbagai macam pendapat informan berdampak pada perilaku politiknya sehingga mereka tidak menyadari bahwa kesetaraan gender dalam politik akan sulit tercapai, Undang-undang telah mengamanatkan tentang proporsi 30 % keterwakilan perempuan di DPR/DPRD namun ini belum tercapai sampai saat ini. Rendahnya keterwakilan perempuan DPR dan DPRD atau keterwakilan politik perempuan ini merupakan persoalan demokrasi, yaitu menyalahi prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka partisipasi politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, harus terus didorong.

Perilaku yang lain ditunjukkan oleh beberapa pemilih perempuan pada saat pemilihan Anggota Legislatif tahun 2014, ketika penulis memberikan pertanyaan yang lebih mendalam lagi soal siapa yang mereka pilih apakah caleg dari kaum laki-laki atau caleg perempuan ternyata rata-

rata mereka menjawab atau memilih caleg dari laki-laki, seperti yang tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 3  
Pilihan Responden terhadap Caleg pada pemilihan Anggota Legislatif 2014

<b>Calon anggota legislatif</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Caleg Laki-laki	74	74,0 %
Caleg perempuan	26	26,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan data kuantitatif 2016

Gambaran tabel diatas menjelaskan kepada kita bahwa mayoritas kaum perempuan tidak memilih caleg dari kalangan perempuan juga, ini menunjukkan kalau anggapan yang selama ini sering kita dengar tentang beberapa persoalan-persoalan perempuan hanya bisa dimengerti oleh sesama perempuan termasuk dalam hal kebijakan politik.

Dari berbagai macam Jawaban yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa responden penelitian ini tampaknya memperteguh beberapa hasil bahwa perempuan lebih konservatif dibanding dengan laki-laki dalam penentuan pilihannya. Namun, kecenderungan ini tidak terjadi pada semua perempuan yang menjadi responden.

Nilai peran gender yang berkembang di masyarakat dan diamini sampai dewasa ini menjadi faktor penting yang bisa memengaruhi pilihan responden. Bilksy & Schwartz (1996) mengatakan bahwa nilai yang dipegang seseorang akan tercermin dari pilihan-pilihan dalam bersosialisasi. Feather (1994) menambahkan bahwa nilai berhubungan dengan keadilan

yang dirasakan oleh seseorang. Seperti yang dikemukakan diatas bahwa nilai-nilai peran gender patriarki telah memengaruhi pandangan individu bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan, terutama untuk urusan publik.

Hal ini terlihat bahwa masyarakat khususnya perempuan lebih mengedepankan nilai-nilai agama yang memandang bahwa dalam urusan kepemimpinan diserahkan kepada kaum laki-laki. Nilai-nilai ini tampaknya terinternalisasi secara tanpa sadar pada diri para responden yang hidup dalam struktur sosial masyarakatnya. Dalam penelitiannya, Ulfaizah (2006) menyimpulkan bahwa interaksi sosial masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat.

Pengaruh itu berasal dari interaksi yang terjadi dalam keluarga, tempat kerja, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan tokoh agama berperan sebagai tokoh politik. Hal semacam itulah yang berpengaruh terhadap pilihan politik responden penelitian ini yang lebih cenderung memilih laki-laki. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga dilatarbelakangi oleh pembentukan kesan yang dibangun oleh media massa (Karakowsky & Siegel, 1999). Intensitas dan manajemen kesan yang tampak pada iklan politik terutama di media massa merupakan faktor eksternal yang tampaknya memiliki pengaruh cukup dominan terhadap perilaku memilih (*voting behaviour*) responden penelitian ini.

Dari penelitian Farida Nurland (2002), paling tidak ada 3 hal yang menjadi kendala peran perempuan pada ranah politik di Indonesia.

- Pertama, faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki yang mengungkung perempuan untuk beraktualisasi pada ranah-ranah domestik. Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktivitas rumah tangga.
- Kedua, adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil atau hukum agama yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki. Sungguh pun bahwa dalil dan hukum tersebut sifatnya adalah tafsir, namun proses sosialisasi yang terus menerus dapat menjadikan hal tersebut sebagai sebuah dogma/hukum yang tak terbantahkan. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam maka agama pun sebenarnya memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka dianjurkan untuk saling bekerja sama.
- Ketiga, munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek. Hal ini seperti yang ditentang oleh banyak aktivis perempuan mengenai Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang masih menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek dan diskriminatif. Perempuan dianggap sebagai pihak yang paling bersalah atas munculnya kejahatan susila. Dengan demikian, dari kacamata ini perempuanlah yang harus membatasi dirinya dan memperlakukan dirinya secara sopan dan terhormat. Bagi aktivis perempuan hal ini

dianggap tidak adil karena negara tidak juga memperlakukan hal yang sama kepada laki-laki. Dengan kata lain, negara masih saja menerapkan diskriminasi susila kepada perempuan dengan mengatur secara mendetail apa-apa yang patut dan boleh dilakukan oleh perempuan.

### **5.1.2 Keterlibatan dalam Pemilihan Anggota Legislatif 2014**

Pada setiap pemilihan umum, warga negara yang terdaftar berhak untuk ikut berpartisipasi dan menjatuhkan pilihan-pilihan berdasarkan keinginan dan penilaiannya. Keikutsertaan perempuan yang merupakan kelompok besar secara kategorial, dapat diukur pada proses ini. Tingkat partisipasi dapat dibandingkan dengan jumlah kuantitas, yang pada dasarnya akan merasakan hasil dari proses demokrasi ini. Perempuan dengan jumlah setengah dari populasi merupakan proporsi yang cukup memiliki korelasi dengan hasil pemilu (Nursal, 2004:88)

Melihat segi kuantitas, jumlah pemilih perempuan di Kecamatan Batulappa lebih banyak dari pemilih laki-laki, proporsi ini tentunya cukup berpengaruh pada hasil pemilu. Perilaku memilih merupakan produk sosial, ada berbagai faktor sosial yang saling berpengaruh dan memunculkan berbagai reaksi terhadap objek-objek politik. Pada bagian ini juga digambarkan mengenai informasi-informasi yang diperoleh oleh perempuan tentang proses pemilihan caleg dan partai serta proses politik yang ada. Informasi yang diterima akan saling terkait dengan lingkungan sosial dan karakter dan aspek kognisi perempuan. Selain itu akan diidentifikasi keikutsertaan dan informasi yang di terima tentang proses

tersebut seperti caleg-caleg yang maju pada Pemilu 2014. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sejauh mana informasi yang diterima oleh perempuan pada proses pemilihan anggota legislatif, maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai indikator untuk mengetahui hal tersebut dan juga untuk mengetahui keikutsertaannya pada pemilihan umum. Diantaranya apakah anda ikut memilih dan siapa yang anda pilih pertanyaan yang lebih mendetail juga diajukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang informasi dan pengetahuan perempuan seperti tanggapan terhadap keterlibatan perempuan pada proses pemilihan umum, dan seberapa penting proses pemilihan umum berpengaruh pada kehidupannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan perempuan, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan terhadap proses pemilihan umum untuk anggota legislatif berbeda-beda. Hal ini juga terlihat dari aspek keikutsertaan pada pemilihan umum yang tidak diikuti oleh seluruh informan. Seperti yang disampaikan oleh Takdir (41) tahun salah satu PPK pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kecamatan Batulappa sebagai berikut:

***“tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Batulappa pada pemilihan legislative 2014 lalu bisa dikata cukup tinggi karena hampir 90 % masyarakat yang mempunyai hak pilih baik laki-laki maupun perempuan turut memberikan hak pilihnya pada saat itu, sebagi bagian dari penyelenggara tentu kita merasa puas dengan kontribusi ini karena ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai menyadari bahwa memilih itu penting untuk diri dan bangsa”*** (Hasil wawancara tgl. 29 juni 2016)

Penjelasan tersebut tidak jauh berbeda dengan data kuantitatif yang diperoleh dilapangan, seperti berikut dibawah ini:

Tabel 4  
Tingkat partisipasi/ menggunakan hak politik pemilih pada pemilihan legislative tahun 2014 lalu

	Frequency	Percent
Ya	91	91,0 %
Tidak	9	9,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan data Kuantitatif 2016

Dari tabel frekuensi diatas menggambarkan bahwa hampir semua responden menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislative tahun 2014 yang lalu, sebanyak 100 responden 91 orang/responden yang mengaku menggunakan hak pilihnya pada saat itu atau sekitar 91,0 %, dan hanya 9 orang/responden yang mengaku tidak menggunakan hak pilihnya atau sekitar 9,0 %. dari sisi partisipasi pemilih tentu cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Pemaparan dari informan diatas memberikan kita cerminan bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan di Kecamatan Batulappa tergolong tinggi, namun ini belum bisa dijadikan indikator dalam melihat atau menilai bahwa Masyarakat khususnya pemilih perempuan di Kecamatan Batulappa ikut berpartisipasi dalam pemilihan legislative 2014 lalu karena kesadaran politiknya tapi bisa jadi karena ada motif lain sehingga mereka turut memberikan suaranya pada saat itu. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Hasni (37) tahun, sebagai berikut

*“saya ikut memilih pada waktu itu (pemilihan legislative 2014) karena suami saya menyuruh dan kebetulan suamiku ada sepupunya ikut maccaleg jadi kita sekeluarga yang sudah bisa memilih yaa kita ikut memilih semua .....”* (Hasil wawancara tgl. 23 juni 2016)

Apa yang diungkapkan oleh salah satu informan diatas membenarkan bahwa pemilih perempuan dalam memberikan hak politiknya pada pemilihan legislative 2014 lalu terkesan diarahkan dan hanya ikut oleh apa yang disampaikan oleh suami, bukan karena kesadaran politiknya untuk perubahan yang lebih baik. Mobilisasi yang massif dari berbagai kelompok kepentingan seperti partai, tim sukses bahkan calon legislative sendiri adalah salah satu pendornng utama sehingga tingkat partisipasi pada pemilihan calon anggota legislative tahun 2014 di Kecamatan Batulappa cukup tinggi. Ungkapan tersebut diatas seiring dengan fakta data kuantitatif yang diperoleh dari lokasi penelitian, sebagaimana berikut ini:

Tabel 5  
Hal yang membuat Responden ikut serta dalam pemilihan Anggota Legislatif 2014

Pilihan	Frequency	Percent
Kemauan sendiri	43	43,0 %
Disuruh atau diarahkan	57	57,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan data kuantitatif 2016

Kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilih pada pemilihan Anggota Legislatif 2014 ternyata masih kurang disadari oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Batulappa,

sebagai mana tergambar pada data yang diperoleh di lokasi penelitian, dimana dari 100 Responden hanya 43 orang yang merasa ikut memilih karena kemaun sendiri dan sebanyak 57 Respondeng yang hanya diarahkan atau dimobilisasi.

Hal ini menunjukka bahwa dari sekian banyak pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Anggota Legislatif 2014 Khususnya di Kecamatan Batulappa menandakan kalau kemandirian dan kesadaran politik pada perempuan sepertinya masih jauh dari harapan. Perilaku politik perempuan di Kecamatan Batulappa tidak jauh berbeda dengan perilaku politik perempuan dikecamatan yang lain yang pada umumnya bersipat cuek dan acuh tak acuh dengan perkara politik.

### **5.1.3 Sikap Dalam Menjatuhkan Pilihan**

Dalam menjatuhkan pilihan pada saat pemilu sangat membutuhkan rasionalitas setiap individu. Raionalitas adalah kemampuan memilih dengan dipengaruhi berbagi pertimbangan baik pertimbangan ekonomi maupun moralitas. Pendekatan rasional ini dipopulerkan oleh Antony Downs (1957) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar lainnya yang bersifat eksternal. Menurut Anthony Downs (1957:365), dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan kaidah dengan memilih partai atau calon kandidat yang tengah berkompetisi, ia bahkan tidak akan melakukan pilihan pada pemilu.

Mereka menggunakan pertimbangan-pertimbangan costs and benefits sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan costs and benefits itu lebih didasarkan pada gagasan atau program-program yang bersentuhan dengan dirinya. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Morris P Fiorina (1981) dalam model keputusan pemilu retrospektif. Dalam model ini tampak bahwa teori perilaku pemilu yang rasional dan pendekatan sosial psikologis sejatinya dapat dikombinasikan dan dikomplementasikan satu sama lain.

#### 5.1.3.1 Model Rasional Retrospektif

Model ini pada dasarnya banyak digunakan masyarakat kita pada saat pemilihan dengan menjadikan latar belakang, kinerja, dan integritas baik partai maupun actor atau kandidat itu sendiri, akan menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan sebuah pilihan.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 6.  
Indikator dalam memilih kandidat.

<b>Pilihan</b>	<b>Frequency</b>	<b>percent</b>
Latar belakang kandidat	29	29,0 %
Status ekonomi	16	16,0 %
Pendidikan	55	55,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: olahan data kuantitatif 2016

Pada dasarnya semua responden menganggap pendidikan adalah hal yang cukup penting dalam menjalankan suatu system politik

pemerintahan seperti menjadi anggota DPRD kabupaten, terlihat dengan banyaknya responden yang memilih pendidikan sebagai indikator dalam menjalankan tugas-tugas politik dengan baik yaitu sebanyak 55,0 %.

Lain halnya yang disampaikan oleh ibu Aminah warga desa Batulappa Kecamatan Batulappadalam wawancaranya mengatakan bahwa:

***“pada saat pemilihan anggota DPRD yang lalu saya pilih salah satu caleg yang tidak perlu saya sebut namanya, saya memilih dia karena saya kagum dengan beliau yang sangat dekat dengan masyarakat dan tidak membedakan masyarakat. Di mata beliau semua orang sama. Dan harus diperlakukan sama tanpa membedakan dia punya jabatan apa dan anak siapa. Kebetulan beliau adalah anggota DPRD sekarang dan sudah membuktikan cuman beliau mencalonkan lagi sebagai anggota DPRD periode 2014-2019” (Hasil wawancara tgl. 27 juni 2016)***

Integritas dan pengalaman seorang calon adalah hal yang menjadi penilai tersendiri dikalangan pemilih, namun kelemahan pemilih *rasional retrospektif* ini adalah menyimpulkan dengan cepat secara general tentang perlakuan seorang kandidat atau caleg ketika terpilih lagi akan sama dengan perhatiannya di periode sebelumnya, mereka tidak mempertimbangkan terhadap perodesasi semua jabatan politik. Padahal banyak kasus dimana seorang caleg atau incumbent baik di periode pertamanya dan sangat merugikan di periode kedua.

### **5.1.3.2 Model Rasional Pragmatis-adaptif**

Model rasionalitas ini memandang bahwa pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untung rugi jika calon yang dipilihnya memberikan manfaat secara menyeluruh. Perilaku pemilih

model tersebut sangat dominan hampir di semua daerah di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten pinrang Kecamatan Batulappa,

Karakteristik pribadi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku politiknya sebagai warga Negara. Kepribadian yang terbuka terhadap sosial lebih memungkinkan seseorang menerima informasi politik dalam lingkungannya. Pemilih yang mengedepankan persoalan emosi semata, sifatnya sangat pragmatis dan mendukung nilai-nilai yang diperjuangkan calon yang akan dipilih. Yang penting calon bisa memberikan apa yang dibutuhkannya secara pragmatis. Seperti uang sogokkan untuk memilih, keikutsertaan dalam organisasi yang dibiayai calon, apalagi telah menjadi tim sukses calon tertentu.

Bentuk tubuh dan pencitraan media menjadi pertimbangan penting juga untuk memilih. Untuk karakter pemilih seperti ini banyak terdapat di Indonesia, terutama dipedesaan dan masyarakat urban perkotaan. Ungkapan seperti yang disampaikan oleh Walid Sanjata Sanjata selaku Penggiat politik sebagai berikut:

***"masyarakat dalam hal ini para pemilih saat ini sangat berpikir pragmatis, saya sering mendengar kalimat dari masyarakat "kapan lagi kita menikmati uang dari calon tertentu, kalau bukan saat sekarang ini karena kalau sudah jadimi nanti pastilah lupa dengan kita." Kalimat ini sudah menjadi ungkapan hampir semua masyarakat dipedesaan dan pinggiran perkotaan, diwarung-warung kopi dan tempat hiburan rakyat lainnya....."***  
(Hasil wawancara tgl. 4 juli 2016)

Apa yang disampaikan oleh Walid Sanjata menggambarkan bagaimana sikap politik masyarakat saat ini bukan hanya di Batulappa tapi hampir disemua daerah di Indonesia, Tentu dengan demikian Demokrasi yang kita

agungkan akan terciderei dan akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang umum di Negara kita Indonesia, sejak system pemilihan kita berubah ke pemilihan langsung, perkara jual beli suara juga semakin mewabah dengan berbagai farian, hal ini seakan menjadi hal yang tak masalah dalam system demokrasi kita dan sudah dilegalkan oleh pihak penyelenggara apa lagi bagi masyakat biasa, buktinya ada beberapa suksesi politik yang sudah di selenggarakan beberapa tahun terakhir yang secara kasat mata telah banyak di nodahi oleh money politik atau politik uang tapi tidak ditindak lanjuti oleh pihak berwenan denga berjuta alasan dan pembenaran yaitu tidak cukup bukti.

Tidak jauh berbeda apa yang terjadi di Kecamatan Batulappa pada saat pemilihan anggota legislative tahun 2014, saat penulis mempertanyakan tentang tanggapan masyarakat terhadap politik uang (money politic), ternyata masih banyak diantara mereka menjawab bahwa itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.  
Pendapat Responden terhadap money politic/ politik uang.

	Frequency	Percent
Setuju	41	41,0 %
Tidak Setuju	48	48,0 %
Tidak menjawab	11	11,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan data Kuantitatif 2016

Meski tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 48,0 % yang menganggap politik uang itu adalah hal yang tidak baik, namun masih banyak juga yang berpendapat bahwa itu adalah hal yang biasa-biasa saja, dan yang lebih memprihatinkan adalah 11,0 % diantara mereka yang menganggap bahwa menyetor politik itu bagus.

Sikap seperti ini akan memicu budaya pragmatisme semakin meluas, sehingga kualitas demokrasi dan pemimpin-pemimpin atau anggota DPRD yang terpilih tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

Faktor kepribadian akan berkaitan dengan figur seorang tokoh sebagaimana yang dihasilkan dari penilaian orang terhadapnya. Sama halnya pemilih yang ada di Indonesia saat ini yang menjatuhkan pilihannya berdasarkan kharismatik yang ada pada calon itu. Seseorang pemilih akan melihat apakah tokoh itu berkharisma, kelihatan peduli terhadap masyarakat atau menyangkut pencitraan terhadap seorang tokoh. Figur dalam membentuk penilaian pribadi seseorang sangatlah kuat. Dimana figur disini berperan untuk menyuntikkan *frame* kepada masyarakat bahwa inilah figur yang baik untuk mewakili kita di legislative. Penulis beranggapan bahwa ini adalah sebuah virus perusak demokrasi yang harus segera dituntaskan. Karena kita tidak akan menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk rakyat, tidak akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar bersuara untuk rakyat. Yang ada wakil rakyat yang berjuang untuk kepentingan perut pribadi dan pemimpin yang bekerja ala mafia. Tebar sebanyak mungkin citra baik ditengah

masyarakat diantara pekerjaan kotor yang telah dikerjakan, bila perlu tebar banyak uang untuk mempengaruhi pilihan rakyat.

Perilaku semacam inilah yang menciptakan budaya pragmatisme politik dalam demokrasi, sehingga celah seperti inilah yang sering dimanfaatkan para calon atau kandidat untuk menggalang dukungan. Fenomena ini tergambar dalam tabel frekuensi dibawah ini:

Tabel 8.  
Sikap Responden terhadap money politik yang dilakukan Caleg

Pilihan	Frequency	Percent
Tdk mengambil	21	21,0 %
Mengambil tapi tidak memilih	37	37,0 %
Mengambil dan memilih	42	42,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: olahan data kuantitatif 2016

Berdasarkan tabel frekuensi diatas, kita dapat menganalisa bahwa sikap dan perilaku pragmatisme pada saat pemilihan legislative tahun 2014 lalu cukup tinggi, dari 100 responden sebanyak 42 atau 42,0 % pemilih mengaku mengambil sogokan dari oknum calon legislative untuk dipilih, 37,0 % yang bersikap hanya mau mengambil sogokan dan tidak memilih, serta hanya 21,0 % yang menyatakan tidak mau mengambil sogokan sama sekali.

Tidak semua pemilih yang bersikap pragmatis di Kecamatan Batulappa dalam keadaan ekonomi lemah. Pemilih yang dari sisi ekonomi tinggi tidak ketinggalan meminta kompensasi material sebelum memberikan

suaranya. Uang yang didapatkan dari calon anggota legislatif hanya digunakan untuk bersenang-senang dirinya. Mereka akan merasa dirugikan apabila tidak ikut serta menerima kompensasi uang, jasa ataupun barang. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi material tetapi kesempatan non material, seperti kesempatan berkumpul bersama teman, diskriminasi dari teman karena dianggap bodoh, dan perasaan bangga jika bisa mendapatkan uang dari calon anggota legislative.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat dianalisis sesuai dengan teori interaksionisme simbolik yang mengarah pada kapasitas mental aktor dan hubungannya dengan tindakan dan interaksi. Semuanya ini dipahami dari sudut proses, ada kecenderungan melihat aktor dipaksa oleh keadaan psikologis internal atau oleh kekuatan struktural bersekala luas (Ritzer, 2003: 317). Aktor dalam hal ini adalah pemilih yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi. Demi mendapatkan pengakuan dari pemilih lain maka seorang pemilih bertindak pragmatis, karena jika tidak maka dia akan dianggap bodoh ketika memberikan suara dengan hati nurani. Desakan rasa ingin menikmati hasil kompensasi dari dalam dirinya juga mempengaruhi tindakan pragmatisnya. Penyebab yang paling kuat dalam eksistensi pemilih, adalah masuknya pemilih ke dalam sistem politik yang pragmatis. Sistem tersebut adalah dampak dari sikap yang ditunjukkan pemilih Di Kecamatan Batulappa, sehingga sangat mudah untuk mempengaruhi pemilih yang masih idealis untuk bersikap pragmatis.

Teori interaksionisme simbolik menyatakan bahwa dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat, kemudian orang lain menafsirkan simbol komunikasi itu dan mengorientasikan tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Berdasarkan interaksi sosial, para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi. Artinya ada hubungan timbal balik antara keduanya (Ritzer, 2004: 293). Pada bagian eksistensi pemilih ini, aktor atau pemilih saling dipengaruhi dan mempengaruhi, termasuk antara pemilih dengan calon anggota legislative.

#### **5.1.3.3 Model Rasional Prospektif**

Model rasional prospektif ini sangat penting dalam menjatuhkan sebuah pilihan politik terutama dalam memilih perwakilan di Legislatif yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik yang sifatnya kebutuhan jangka pendek apa lagi kebutuhan jangka panjang.

kesadaran akan perubahan seharusnya menjadi faktor atau acuan untuk menjatuhkan sebuah pilihan terhadap Calon Anggota Legislatif (DPRD) pada pemilihan anggota legislative 2014 yang lalu, terutama perubahan dari sisi ekonomi dan infrastruktur di pedalaman, hal ini sebenarnya diakui oleh beberapa responden saat ditanya soal pentingnya perubahan yang lebih baik pemilihan anggota legislative 2014, sebagai berikut:

Tabel 9.  
Keyakinan Responden terhadap perubahan yang lebih baik lewat  
Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2014

<b>Pilihan</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Yakin	91	91,0 %
Tidak yakin	9	9,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan data kuantitatif 2016

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Responden akan sebuah perubahan lewat pemilihan anggota legislative cukup tinggi yaitu sekitar 91,0 % yang menyatakan yakin akan ada perubahan dan hanya 9,0 % yang menyatakan kurang atau tidak yakin kalau pemilihan anggota legislative 2014 yang telah lewat akan membawa perubahan yang lebih baik.

Namun kesadaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang terjadi, hal ini dikarenakan mayoritas pemilih di Kecamatan Batulappa masih sangat terpengaruh oleh factor-faktor internal maupun eksternal tanpa mengedepankan rasionalitas prospektifnya.

Dalam ilmu ekonomi, rasional ialah suatu hal yang paling menguntungkan, namun dalam prespektif politik ialah suatu yang dapat memenuhi dan memperjuangkan aspirasi politiknya. Karena itu jika ada calon kandidat yang tidak bisa menawarkan dan merasionalkan programnya pada sebuah pilihan, terutama di depan para pemilih-pemilih yang rasional maka kandidat tersebut akan sulit untuk menang. pandangan diatas sangat di dukung oleh Bupati Pinrang A. Aslam Patonangi saat diwawancarai di areal kantor Bupati, beliau menyampaikan bahwa:

***“...pada beberapa pemilihan sebelumnya termasuk pemilihan anggota legislatif 2014, masyarakat dalam hal ini pemilih terkesan hanya dimobilisasi sehingga tidak ada kekuatan politik mereka pasca suksesi, seandainya masyarakat kita betul-betul menyadari substansi dari pemilihan saya yakin akan terpilih figure-figur yang berkualitas dan berkompoten, sayangnya masyarakat masih kurang memahami apa yang disebut dengan rasional choice (pilihan rasional) seperti yang dilakukan masyarakat dinegara-negara maju...”(Hasil wawancara tgl. 13 juli 2016)***

Namun pertimbangan pilihan rasional ini pada pemilihan anggota legislative tahun 2014 yang lalu terkhusus di Kecamatan Batulappa menunjukkan bahwa sejumlah pemilih khususnya pemilih perempuan factor rasionalitas tidak begitu berpengaruh dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Berdasarkan data (lihat di tabel 5 ) menjelaskan bahwa hanya sekitar 15,0 % dari jumlah populasi yang perilaku politiknya dipengaruhi karena kesadaran atas kemampuan para calon legislative merubah tatanan kehidupan masyarakat Batulappa. Seperti yang disampaikan oleh M. Rusli (Camat Batulappa) saat diwawancarai:

***“pemilihan anggota legislative 2014 yang lalu sangat dinodahi oleh perilaku sebagian kandidat dan tim suksesnya, bayangkan pada H -1 pemilihan, ada beberapa kandidat yang telfon saya untuk dikondisikan dalam artian meminta ke saya supaya dibantu untuk memuluskan pembagian sembakonya, lain lagi laporan dari masyarakat bahawa ada yang melakukan serangan fajar. Melihat juga kondisi masyarakat kita yang masih sangat pragmatis sehingga sebagian calon legislative memamfaatkan kekurangan itu, masyarakt disini pak mereka memilh kandidat, bukan karena kesadarannya mau membangun kampung, tapi masih banyak yang berpikiran pendek....”(Hasil wawancara tgl. 21 juli 2016)***

Dalam konteks pemilihan legislatif 2014, rakyat Kecamatan Batulappa tampaknya belum cukup banyak belajar dari pengalaman pemilu 1999, 2004, dan 2009 di era reformasi. Sehingga jika dikatakan bahwa

banyak pemilih pada pemilu 2014 hanya sekadar jadi pengikut dan tidak sanggup bersikap rasional, bagi saya itu tidak salah dan itu bisa diterima dalam konteks terbatas, karena memang akan selalu ada jenis pemilih yang tidak rasional. Namun, jika hasil pengamatan itu coba diterapkan secara meluas pada konteks pemilu 2014 mungkin terasa kurang pas karena saya yakin fenomena ini tidak berlaku disemua daerah di Indonesia.

Menurut peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Wasisto Raharjo Jati, preferensi pemilih di Indonesia selalu menampilkan wajah berbeda dalam setiap periode. Dalam Pemilu 1999, yang diikuti oleh 48 partai politik dengan berbagai latar belakang aspirasi dan ideologi, preferensi pemilih sangat dipengaruhi konteks neo-politik. Sedangkan dalam pemilu 2004, preferensi pemilih berdasarkan basis neo-politik agak tereduksi, tetapi justru media massa yang berperan besar dalam mengonstruksi dan mengkreasi preferensi politik publik.

Preferensi politik pemilih pada 2004 digerakkan lewat isu dan desain yang begitu kuat. Juga terjadi proses deideologisasi, ketika simbol-simbol tidak lagi menjadi acuan dalam memilih. Lemahnya basis ideologis membuat pemilih Indonesia labil secara politik, sehingga emosi dan kondisi psikologisnya mudah dimanipulasi secara instan dan artifisial. Akibatnya, pada pemilu 2009, preferensi politik publik sangat bercorak rasionalitas terkungkung (*boundedrationality*).

Perilaku memilih terkait dengan identifikasi pemilih terhadap kandidat dalam pemilu. Khusus pemilihan legislative 2014 yang lalu figur

calon anggota legislative menjadi salah satu penentu ketertarikan pemilih untuk memilih kandidat yang ada. Artinya kekuatan dan kelebihan calon dan isu yang diusulkan sebagai bahan kampanye menjadi basis pertimbangan rasional bagi pemilih untuk menentukan pilihan suaranya.

Persoalan untung rugi dalam prespektif ekonomi yang menyangkut untung rugi seorang pemilih, adalah tidak mengherankan pemilihan anggota legislatif 2014 dengan gencar-gencarnya perbincangan sebuah istilah yang namanya *money politik* dimana yang memiliki kekayaan berlebih memiliki peluang yang lebih besar untuk menang Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Nurhaya:

***“.....kalau sudah ada calon yang menggunakan money politik di masyarakat, sudah pasti tidak akan saya pilih. Belum jadi pemimpin saja sudah buat cara licik untuk cari pemilih bagaimana kalau dia nanti yang memimpin.....”***(Hasil wawancara tgl. 11 juli 2016)

Turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilu jangan sampai menyalahgunakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian pemilih harus memberikan suara kepada calon yang tepat. Ketidakikutsertaan dalam pemilihan umum sebenarnya justru

akan membuat warga Negara memiliki masalah baru karena harus mengikuti segala peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin terpilih.

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada kualitas kepekaan pemilih terhadap informasi politik melalui komunikasi yang didapatkan oleh pemilih, baik itu dari sumber elektronik maupun sumber tertulis seperti surat kabar. Informasi yang dihadapkan oleh pemilih membuat pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan sikap rasionalitas.

Menyangkut persoalan penilaian masing-masing pemilih terhadap kandidat yang akan mereka pilih maka nilai akan melibatkan kesukaan dan ketidaksukaan. Janji-janji apa dan bukti nyata apa yang sudah dia kerjakan dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa memang dia layak menjadi pemimpin kota ini.

Tingkat kepekaan rasionalitas yang dimiliki pemilih ini menunjukkan bahwa demokrasi itu harus dibangun dengan adanya pemilih cerdas yang memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dan tidak asal memilih pemimpin yang hanya mampu memberikan uang sebesar 50 ribu dan memimpin selama 5 tahun kedepan.

## **5.2 Factor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Perempuan**

Pemilu adalah sarana untuk mengimplementasikan demokrasi. Sehingga sangat sulit dikatakan demokrasi tanpa diadakan sebuah pemilihan umum. Meskipun demikian, pemilu bukan tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Salah satu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan adalah dengan diadakannya pemilihan umum. Seperti pemilihan legislative yang telah dilakukan pada 2014 lalu tak terkecuali di Kabupaten Pinrang, Untuk mewujudkan Pinrang lebih baik masyarakat dituntut untuk memberikan suara kepada orang yang memang dipandang dapat mewakili aspirasi masyarakat di parlemen. Pemilih perempuan Kab. Pinrang khususnya di Kecamatan Batulappa pada Pemilihan legislatif 2014 dalam memberikan pilihan politiknya memiliki bermacam-macam pertimbangan yakni pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pertimbangan rasional.

Pilihan-pilihan politik perempuan tentunya tidak hadir begitu saja, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai hal. Perempuan dan politik merupakan suatu fenomena yang khas, dan didalamnya mencakup pola perilaku politik perempuan dengan berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya. Pada pemilihan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, merupakan rangkaian proses demokrasi yang menyajikan berbagai rangkaian peristiwa, setiap individu akan menyambut hal tersebut secara berbeda-beda. Tentunya ada banyak ragam informasi yang harus disediakan, baik oleh pelaksana Pemilu terkait dengan tata cara memilih yang baik dan benar, maupun dari peserta Pemilu sendiri (partai dan Caleg) terutama mengenai apa yang akan mereka lakukan sebagai bentuk kontribusi positif mereka jika ingin dipilih.

Keterpenuhan informasi tentang proses ini tergantung akses untuk mendapatkan informasi tersebut. *Stereotype* terhadap masalah politik sebagai wilayah publik cenderung dianggap sebagai wilayah laki-laki, menjadi hambatan bagi perempuan yang dianggap mengurus wilayah domestik. Hal ini membuat akses terhadap informasi menjadi berbeda.

Ada berbagai hal yang terlibat dalam proses munculnya perilaku politik perempuan. Proses menjatuhkan pilihan dan pemahaman serta tanggapan terhadap berbagai fenomena politik didasari oleh berbagai hal dan faktor sosial. Hal ini melibatkan dimensi kognisi dan juga dimensi afeksi berupa hal-hal yang bersifat emosional. Selain hal tersebut, terdapat dimensi evaluatif yang menjadi preferensi dalam bersikap selanjutnya.

Maka dari itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari perilaku politik perempuan dan hal-hal yang mendasari pilihan-pilihan politiknya, diajukan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memperoleh keterangan yang mendetail dari informan yang diwawancarai. Pertanyaan yang diajukan adalah keikutsertaan memilih pada pemilihan legislative tahun 2014 lalu. Pertanyaan kedua adalah hal yang mendasari ketika menjatuhkan pilihan politiknya pada saat pemilihan. Disamping kedua pertanyaan utama tersebut, diajukan juga beberapa pertanyaan untuk mengontrol dan mengarahkan jawaban informan sehingga diperoleh informasi yang lebih spesifik. Dari hasil wawancara dan yang dilakukan selama dilapangan, maka ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan pada pemilihan anggota legislatif di Kecamatan Batulappa antara lain :

### 5.2.1 Pengetahuan Pemilih

Pemilu 2014 lalu menjadi hal yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, dimana nasib bangsa indoneisa ditentukan selama satu periode kedepan. Pemilihan legislative sebagai bagai dari pemilihan umum pada saat itu telah berhasil mengantarkan wakil-wakil rakyat kekursi empuk kekuasaan, baik di DPR RI, DPRD Provinsi sampai DPRD kabupaten/Kota, Kabupaten Pinrang sebagai daerah yang memiliki pemilih yang terbilang besar diantara beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan berhasil mendudukkan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sebanyak 40 orang yang terdiri dari 37 laki-laki dan 3 perempuan. Meskipun terbilang sukses dalam menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2014 lalu, namun dibalik kesuksesan tersebut ada beberapa hal yang menjadi point penting yang harus dilihat secara obyektif terutama persoalan perilaku politik para pemilih pada saat itu khususnya pemilih perempuan yang hanya mempunyai tiga wakil yang berhasil duduk secara refresentatif, hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa hal tersebut dengan mengambil satu sampel Kecamatan yang menjadi fokus yakni kecamatan Batulappa.

Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana perilaku politik pemilih Perempuan dan factor-faktor apa yang mempengaruhinya pada pemilihan legislative tahun 2014 yang lalu. Terkait dengan itu, penelitian ini mewawancarai 11 informan yang tersebar di empat Desa dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Batulappa. Kesebelas informan yang

diwawancarai tersebut dianggap mewakili/representasi dari populasi yang ada karena berasal dari beberapa profesi seperti: pemerintah, politisi, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan.

Namun diketahui dari beberapa informan dan dari data responden menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat khususnya pemilih perempuan terhadap pemahaman politik sampai pada tingkat pengetahuan mereka pada para calon legislative masih sangat rendah. Mereka kurang memahami makna dari politik tersebut. Seperti yang disampaikan salah satu responden Wahida (36) tahun sebagai berikut:

***“Kami tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksud politik kami taunya memilih saja itupun biasaki bingung siapa yang mau dipilih karena banyak sekali calon baru tidak ditau siapa-siapa.....” (Hasil wawancara tgl. 23 juni 2016)***

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat di Kecamatan Batulappa soal politik khususnya pemilih Perempuan masih sangat rendah, meskipun kita tidak bisa serta merta mengambil kesimpulan atau mengeneralisasi namun apa yang disampaikan oleh salah satu Informan diatas dapat dijadikan sebagai gambaran umum untuk menilai bagaimana pengetahuan perempuan terhadap politik yang secara tidak sadar ternyata berpengaruh besar terhadap sikap dan perilaku politiknya.

Pengetahuan sebagai modal sosial tentu menjadi kebutuhan yang sangat substansi dalam kehidupan, memang terkadang kita (Masyarakat) kurang mengerti secara defenisi apa yang dimaksud dengan politik namun sesungguhnya kita telah banyak memperaktekannya dalam dunia sehari-

hari, pernyataan tersebut juga persis dengan data kuantitatif yang diperoleh di lokasi penelitian:

Tabel 10.  
Tingkat pengetahuan Responden terhadap politik

	Frequency	Percent
Ya	33	33,0 %
Tidak	67	67,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: olahan data Kuantitatif 2016

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pemilih perempuan memang sangat rendah, dari 100 Responden 67,0 % yang mengaku tidak tau atau tidak mengerti apa yang dimaksud dengan politik dan hanya 33,0 % yang mengaku tau dan mengerti apa itu politik. Secara tidak langsung tingkat pengetahuan akan mempengaruhi sikap dan perilaku politik para pemilih.

Perilaku politik adalah pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, *lobbying*, kampanye dan demonstrasi).

Proses sosialisasi merupakan proses transmisi nilai dalam suatu masyarakat tertentu dari generasi ke generasi yang berlangsung sepanjang waktu. Dalam proses sosialisasi, masyarakat memperoleh informasi, ide

dan nilai-nilai yang menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap objek-objek politik. Informasi ini diterima oleh individu melalui media, keluarga dan lingkungan sosial dan menjadi dasar pengetahuan yang digunakan bagi masyarakat atau individu untuk menjatuhkan pilihan-pilihan politiknya. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan Walid Sanjata:

***“pola pembentukan karakter tentunya tidak bisa dilepaspisahkan dengan alam lingkungan kita karena lingkungan ini ibarat rumah yang setiap waktu pasti kita menempatinya, berkaitan dengan politik kami sebagai warga, tidak pernah mendapat sosialisasi tentang politik, saya tidak tau kalau di desa lain”***  
(Hasil wawancara tgl. 4 juli 2016)

Proses transmisi nilai-nilai yang diterima individu yang berasal dari keluarga, lingkungan pergaulan dan media massa. Inilah yang kemudian membentuk persepsi seseorang terhadap fenomena politik. Proses sosialisasi juga membentuk predisposisi seseorang dalam menilai sesuatu. Studi yang dilakukan di Kecamatan Batulappa ini, menunjukkan bahwa lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seseorang dalam membentuk pengetahuan-pengetahuan tertentu. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman sepermainan, sekolah dan pekerjaan serta media berperan sangat besar dalam membentuk struktur pengetahuan dan preferensi seseorang untuk menjatuhkan pilihan politiknya.

Dalam penelitian ini, diajukan pertanyaan tentang sumber memperoleh pengetahuan terhadap masalah politik dan bagaimana

pengaruh pengetahuan tersebut terhadap pilihan politiknya. Dalam menjawab pertanyaan ini, sebagian besar informan mengatakan bahwa pengetahuan yang mereka miliki tentang politik sangat minim.

Terkait dengan sumber informasi mengenai calon anggota legislative tahun 2014 yang lalu, mereka dapatkan dari berbagai sumber diantaranya dari lingkungan pergaulan seperti keluarga, teman, lingkungan pendidikan, pekerjaan, tempat umum dan orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Disamping itu informan juga mengatakan memperoleh informasi dan pengetahuan tentang politik dari media seperti baliho, spanduk, selebaran, HP dan radio. Berkenaan dengan hal tersebut dapat kita lihat hasil penelitian seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 11.  
Sumber Informasi Calon Anggota Legislatif 2014

Pilihan	Frequency	Percent
Kerabat	46	46,0 %
Tim sukses	24	24,0 %
Media	30	30,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan data Kuantitatif 2016

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa kebanyakan Informan mendapatkan informasi mengenai calon anggota legislative pada tahun 2014 di Kecamatan Batulappa melalui sanak keluarga atau kerabat yaitu sebanyak 46,0 %, kemudian informassi dari tim sukses itu sebanyak 24,0 % dan lewat media seperti baliho, hp dan radio sebanyak 30,0 %.

Ketika informan ditanya tentang pengaruh pengetahuan mengenai masalah-masalah politik dengan pilihan-pilihan politiknya, informan menjawab bahwa mereka kurang mendapatkan pengetahuan tentang tata cara memilih dan terutama tentang profil caleg dan partainya. Seperti yang diungkapkan oleh Muliana (28 tahun) salah satu informan dari Desa Kaseralau

*“masyarakat disini tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari penyelenggara/KPU tentang proses pemilihan anggota dewan, yang ada hanya kampanye yang dilakukan oleh para calon...”*  
(Hasil wawancara tgl. 13 juli 2016)

Sosialisasi politik memang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencerehan politik, namun apa yang disampaikan oleh Muliana (salah satu informan) menggambarkan bahwa pihak berwajib dalam hal ini pemerintah, KPU dan pertain politik tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Sesuai dengan pengakuan salah satu dari informan diatas, tidak jauh berbeda dengan data kuantitatif yang diperoleh dilapangan, sebagaimana tertera dibawa:

Tabel 12.

Frekuensi terhadap pernah tidaknya mendapatkan sosialisasi, pelatihan dansemacamnya tentang politik dari Pemerintah, partai politikatauLSM

Pilihan	Frequency	Percent
Ya	28	28,0%
Tidak	72	72,0%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: olahan data kuantitatif 2016

Dari data tersebut benar menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Batulappa sangat kurang mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya memahami politik, dimana dari 100 responden hanya 28,0 % yang mengaku pernah mendapat atau mengikuti sosialisasi politik dan sebanyak 72,0 % yang mengaku tidak pernah sama sekali mendapatkan hal tersebut.

Sosialisasi sebagai salah satu metode dalam menyampaikan pengetahuan ternyata tidak dilakukan oleh pihak berwajib, secara otomatis berdampak pada tingkat pengetahuan masyarakat tentang substansi politik itu sendiri, dan tidak mengherankan jika perilaku politik pemilihan perempuan dikecamatan batulappa mengalami stagnasi yang cenderung ikut arus.

Terutama tingkat pengetahuan masyarakat terhadap caleg dan partai-partai yang tidak populer, meskipun ada peran media massa seperti baliho, stiker dan semacamnya akan tetapi kecenderungan perempuan kurang memiliki perhatian pada masalah-masalah politik, kecuali perempuan pada kalangan-kalangan tertentu yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan memiliki aktivitas di wilayah publik. Arahan akan pilihan-pilihan politik akan cenderung lebih banyak mereka dapatkan dari keluarga, kelompok bergosip (teman sepergaulan) dan bahkan dari elit-elit kampung (kepala Desa, Dusun) yang secara tidak langsung memberikan afirmasinya pada seorang caleg ataupun partai-partai tertentu.

Domestifikasi sosial atas peran-peran perempuan yang cenderung berkembang di kalangan perempuan kampung, justru cenderung membuat perempuan di Kecamatan Batulappa malah rentan menjadi komodifikasi keluarga dalam transaksi politik Uang, yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki. Terlihat jelas bahwa lingkungan pergaulan, keluarga dan media memberi kontribusi yang cukup besar dalam membentuk pengetahuan seseorang terhadap informasi politik. Pada gilirannya, pengetahuan inilah yang digunakan untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Jadi disini terlihat jelas peran lingkungan dan akses informasi dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Persis apa yang disampaikan oleh Bogel (Nama samara) selaku tokoh pemuda Desa Watang Kassa.

***“kalau ditanya tentang pengetahuan politik kami tidak banyak mengerti itu pak intinya waktu pemilihan legislative 2014 lalu masyarakat hanya mengandalkan pengetahuan dari cerita pangka-pangka alias gosip ditambah arahan keluarga dan kerabat .....”*** (Hasil wawancara tgl. 16 juli 2016

Data yang diperoleh selama penelitian juga menunjukkan relasi yang kuat antara lingkungan pergaulan seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan dalam mempengaruhi pengetahuan seseorang terhadap fenomena politik. Kebanyakan informan dalam penelitian ini mengaku memperoleh pengetahuan tentang politik dari lingkungan keluarga dan pergaulan mereka. Pengetahuan-pengetahuan tersebut kebanyakan berupa pengetahuan identitas calon legislatif. Kebanyakan informasi tentang caleg banyak didapatkan justru dari mulut ke mulut dari sesama pergaulan di lingkungan masing masing ketika

mereka membicarakan (gosip) tentang pilihan-pilihan politik mereka sendiri ataupun pilihan orang tuanya ataupun suaminya.

Ini menunjukkan bahwa korelasi lingkungan sosial dengan pilihan politik sangat erat, lingkungan pergaulan dalam hal ini berupa lingkungan tempat tinggal dan keluarga serta lingkungan pendidikan sangat berpengaruh dalam penyediaan informasi dan membentuk pengetahuan-pengetahuan terhadap pilihan-pilihan politik perempuan. Pada sisi yang lain media massa juga menyediakan informasi cukup berperan akan tetapi kurang memberikan pengaruh. Proses sosialisasi yang berlangsung dalam lingkungan sosial membawa dampak pada terbentuknya persepsi seseorang terhadap objek-objek politik yang pada akhirnya berpengaruh pada pilihan politik. Terdapat hal yang sangat penting dalam proses sosialisasi ini, proses sosialisasi pada dasarnya menyediakan berbagai informasi untuk orang-orang yang berada dalam suatu komunitas.

Persoalan status sosial ekonomi, kelompok ras, etnik, usia, jenis kelamin dan agama menjadi faktor pendukung dalam melihat perilaku politik perempuan dilingkungan tempat tinggalnya. Bagaimana status sosial itu membentuk pola pikir dalam bertindak. Seseorang atau perempuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk seperti yang ada di Kecamatan Batulappa termasuk pemilih atau perempuan yang terlibat dalam sebuah kelompok lembaga tertentu baik formal ataupun non formal akan mempengaruhi perilaku mereka.

Kandidat dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat atau pemilih dengan cara menggunakan status ekonomi pemilih sebagai sebuah celah khusus dan melemparkan isu mengenai segalanya ada istilah gratis, maka dengan mudahnya kandidat memperoleh suara dari pemilih tersebut, apalagi sebagian besar dari pemilih yang ada di Indonesia khususnya di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang termasuk pemilih tradisional jika kita lihat berdasarkan jenis pekerjaan dan pendapatan perekonomiannya perbulan.

Berdasarkan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh pemilih dalam konteks ini pemilih dengan jenis pekerjaan petani dan sebagainya dapat menjadikan pemilih menjadi pasif dalam memperoleh informasi tentang kandidat sehingga pandangan tentang kandidatpun menjadi ragu-ragu sehingga tidak ada kejelasan terhadap pilihan pemilih. Peristiwa ini akan menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat dimana akan terbentuk pola perilaku baru. Dimana masyarakat khususnya perempuan dalam menentukan pilihannya dalam keadaan ragu-ragu karena tidak mendapatkan gambaran yang jelas terhadap kandidat atau calon yang akan dipilihnya nanti atau dalam istilah politik dikenal dengan istilah pemilih pragmatis atau pemilih apatis. Sikap apatis yang kebanyakan ditemukan dilokasi penelitian di Kecamatan Batulappa khususnya kaum perempuan dikarenakan perempuan kurang memiliki keinginan atau ketertarikan bicara apalagi terlibat dalam dunia politik

Selain status ekonomi dari pemilih, tingkat pengetahuan dan waktu luang dari pemilih sangat diperlukan agar mengetahui kandidat lebih dekat dan tahu kepribadian dari calon tersebut. Tapi dengan kesibukan yang dimiliki para pemilih mengakibatkan pilihan mereka sering dipengaruhi oleh keadaan lingkungan entah itu berasal dari lingkungan sekitar seperti tetangga dan tim sukses dan bahkan sampai pada pengaruh atau ajakan yang diberikan oleh birokrasi setempat seperti ketua RT dan RW.

Data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian tentang bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap calon legislative yang ada di dapil I khususnya caleg yang berasal dari Kecamatan Batulappa menunjukkan kalau ternyata masyarakat khususnya pemilih perempuan masih banyak yang tidak mengetahui atau mengenali caleg yang mereka pilih seperti yang tertera dibawah ini:

Tabel 13.  
Tingkat pengetahuan Perempuan terhadap Caleg 2014

Pilihan	Frequency	Percent
Ya	37	37,0 %
Tidak	63	63,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: olahan data Kuantitatif 2016

Merujuk pada data diatas, kita dapat melihat bahwa pemilih perempuan yang ada di Kecamatan Batulappa ternyata masih banyak yang tidak mengenal atau mengetahui para calon anggota DPRD yang berasal dari Kecamatan Batulappa, sebanyak 37,0 % responden yang

mengaku mengenal semua caleg yang berasal dari Kecamatan Batulappa dan sebanyak 63,0 % yang mengaku tidak tahu.

Secara sosiologis, hal ini tentu memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku politik perempuan di Kecamatan Batulappa, sehingga pada pemilihan legislative 2014 yang lalu, masyarakat khususnya perempuan dihadapkan dengan berbagai macam masalah terutama dalam menentukan pilihan politiknya. Banyaknya calon legislative membuat para pemilik suara bingung dalam menentukan sikap politiknya. Darma selaku wargayang tinggal di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa mengatakan bahwa;

***“waktu pemilihan calon anggota dewan kemarin, banyak sekali kandidatnya, jadi saya tidak mau pusing untuk memilih siapa yang terbaik. Intinya siapapun yang terpilih itulah yang didukung karna sudah berapa kalimi orng memilih begini tidak adaji perubahan dilihat, kalau waktu kampanyemi banyak sekali janj-janjinya, pas sudah terpilih datang saja jarang apa lagi mauki nabantu” (Hasil wawancara tgl. 27 juni 2016)***

Hasil wawancara diatas yang dilakukan di kantor kelurahan Kassa pada saat itu informan menggambarkan bahwa sebagian pemilih khususnya pemilih perempuan tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menentukan pilihan politiknya, sehingga pemilih perempuan cenderung berperilaku apatis terhadap perubahan yang mungkin terjadi pasca pemilihan legislative, perilaku ini banyak ditemukan pada masyarakat saat ini bukan hanya disaat pemilihan legislative tapi hampir di semua suksesi politik yang telah diselenggarakan.

Pemilihan legislative yang telah dilaksanakan 2014 yang lalu, memberikan gambaran kepada kita bahwa lingkungan dapat membentuk karakter seseorang dalam menentukan sikap dan perilaku politik. Lingkungan sangat berperan penting dalam menentukan pilihan karena lingkungan dapat membentuk pola pikir, lingkungan dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Lingkungan arti secara luas yaitu perilaku pemilih dapat dibentuk berdasarkan interaksi pemilih terhadap pasangan kandidat dan pemilih dengan masyarakat secara menyeluruh. Dan lingkungan secara sempit didapatkan oleh pemilih berdasarkan interaksi dengan lingkungan keluarga atau tetangga terdekat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa teori sosiologis masih relevan untuk menjelaskan bagaimana perilaku politik perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 seperti teori yang dikemukakan oleh Anwar (2006) bahwa kelompok keagamaan, organisasi profesi, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok kecil lainnya memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang, yang nanti sebagai dasar atau preferensi dalam menentukan pilihan politiknya.

### **2.2.2 Faktor Lingkungan**

Behavioral, Ritzer (2007:356) mengatakan sosiologi perilaku berawal dari behavioral, dimana sosiologi perilaku memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap

lingkungan dan dampak lingkungan terhadap perilaku aktor. Hubungan ini adalah dasar untuk pengkondisian peran (operant conditioning) atau proses belajar melaluinya perilaku diubah oleh konsekuensinya. Dalam teori behavioral dikenal pemahaman reinforcement yang dapat diartikan sebagai reward (ganjaran). Perulangan atas suatu tindakan tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap tindakan itu sendiri. Perulangan ini dirumuskan dalam pengertian terhadap aktor. Dimana suatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor, maka tindakannya tidak akan diulang.

Dalam dunia sosial lingkungan sangat berperan dalam membentuk sikap dan karakter individu maupun kelompok, seperti cultur, agama, keluarga, dan lain-lain.

Kalau Selama ini Etnis merupakan faktor yang paling penting untuk menunjang keterpilihan seseorang calon pemimpin dalam pemilihan umum. Tetapi pada saat pemilihan anggota legislative tahun 2014 lalu hubungan etnisitas tidak lagi menjadi dominan dalam menentukan perilaku politik perempuan khususnya diwilaya Kecamatan Batulappa, dari 7 calon anggota DPRD, 5 laki-laki dan 2 perempuan yang ikut berkompetisi yang berasal dari Kecamatan Batulappa tak satupun dari mereka yang berhasil lolos atau terpilih. Hal ini tentunya menjadi gambaran bahwa isu-isu etnisitas bukanlah isu penting lagi dalam pemilihan legislative 2014.

Menurut Herna salah satu informan yang kami wawancarai di Desa Tapporang menyampaikan bahwa:

*“.....pada saat itu (pemilihan anggota legislative 2014) saya tidak memilih caleg yang berasal dari Kecamatan Batulappa bahkan ada satu orang caleg satu desa dengan saya tapi bukan itu saya pilih karena dia bukan asli orang batulappa, saya memilih caleg yang berasal dari kecamatan lain karena kebetulan sepupu dan memang baik orangnya...”*  
(Hasil wawancara tgl. 16 juni 2016)

Apa yang disampaikan oleh Herna adalah gambaran bahwa masyarakat saat ini khususnya perempuan tidak lagi menjadikan etnik sebagai suatu pegangan utama dalam menentukan sikap politiknya khususnya dalam konteks politik lokal, landasan primordialisme yang sering dijadikan referensi dalam melihat fenomena politik sepertinya sudah tidak relevan untuk saat ini. Data kuantitatif yang kami peroleh dari lokasi penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator etnik, kesamaan jenis kelamin dan sebagainya tidak mesti dijadikan patokan lagi dalam mengkaji social politik saat ini.

Tabel 14.

Hal yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih calon Legislative

	Frequency	Percent
Visi / misi calon	15	15,0 %
Cintra calon	8	8,0 %
Kesamaan agama dengan calon	13	13,0 %
Hubungan keluarga dan kekerabatan dgn calon	53	53,0 %
Status social	11	11,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: olahan data kuantitatif 2016

Melihat frekuensi data diatas menunjukkan bahwa perempuan dalam menentukan pilihan politiknya memiliki sikap dan perilaku yang

berbeda-beda, ada yang mempertimbangkan visi-misi caleg, ada yang mempertimbangkan kesamaan etnis dan tidak sedikit yang mempertimbangkan karena hubungan kekerabatan dengan calon.

Dari data tersebut menjelaskan bahwa 15,0 % pemilih perempuan menjatuhkan pilihan politiknya karena visi-misi kandidat, 8,0 % karena pencitraan, 13,0 % kesamaan agama, 53,0 % karena hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan calon dan 11,0 % karena status sosial caleg.

Kesadaran politik dalam konteks pemilu merupakan factor utama dalam mengukur sejauh mana representasi perwakilan masyarakat dalam lembaga legislative untuk menciptakan iklim politik yang lebih membangun.

### **2.23 Intervensi atau Tekanan**

Faktor kelompok penekan (*pressure group*) Ajang pemilihan langsung merupakan sebuah ajang demokratis, namun juga tidak menutup kemungkinan terjadinya praktek premanisme atau apapun bentuknya yang menekan pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Selain itu juga ada tekanan dari kelompok dimana masing-masing individu berada seperti keluarga, pertemanan, lingkungan pekerjaan dan sebagainya.

Independensi dalam menentukan pilihan pada setiap hajatan politik tak terkecuali pemilihan anggota legislative 2014 adalah hal yang sangat di impikan dalam konteks demokrasi, namun munculnya kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik, ormas dan lain-lain ditengah proses demokratisasi dianggap mencederai misi demokrasi yang selama ini

senang tiasa mendengung-dengungan nilai-nilai kemandirian dan indevendensi. Tak terlepas di daerah mana, seperti Intervensi kepada kaum perempuan dalam menjatuhkan suatu pilahan politiknya pada Pemilihan Anggota Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, data menunjukkan bahwa:

Tabel 15.  
Beberapa faktor dalam menjatuhkan pilihan

<b>Pilihan</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>
Suami/keluarga	48	48,0 %
Tim sukses	27	27,0 %
Tokoh masyarakat	25	25,0 %
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Olahan data kuantitatif 2016

Kemandirian politik kaum perempuan pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014 di Kecamatan Batulappa sepertinya hanyalah sebatas konsep, hal tersebut tergambar pada saat dalam satu hasil penelitian tentang beberapa factor yang sangat mempengaruhi atau yang menginterfensi pemilih perempuan diantaranya adalah intervensi atau tekanan dari keluarga/suami dan ini yang cukup tinggi yaitu sebanyak 48,0 %, dari tim sukses sebanyak 27,0 % dan tekanan dari tokoh masyarakat yaitu sebanyak 25,0 %. Hal ini menggambarkan bahwa pengaruh atau factor tekanan keluarga dalam hal ini suamilah yang paling dominan dibanding pengaruh atau intervensi dari tim sukses dan tokoh masyarakat.

Pemilih perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam menentukan pilihan seperti adanya pengaruh dari budaya patriarkhi yang

ada. Hal ini dapat diartikan, keterwakilan politik perempuan yang rendah bisa dikarenakan pemilih yang sedikit untuk memilih calon perempuan dalam pemilu legislatif. Padahal jika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan pemilih yang ada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang pemilih perempuan secara kuantitas lebih besar dari pemilih laki-laki yaitu sebanyak 3.967 pemilih perempuan dan sebanyak 3.760 pemilih Laki-Laki. Sehingga seharusnya apabila mayoritas dari penduduk perempuan tersebut memilih calon legislatif dari kaum perempuan juga tentunya perolehan suara calon perempuan akan lebih besar dan keterwakilan politik perempuan di legislatif akan lebih banyak pula, minimal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

Permasalahan kurangnya dukungan terhadap calon legislatif perempuan seharusnya sudah menjadi suatu kajian dan evaluasi tersendiri bagi penyelenggara dan partai-partai politik di negeri ini, tak terkecuali di Kabupaten Pinrang, dimana semenjak system pemilihan langsung diterapkan kuota 30 % untuk keterwakilan kaum perempuan tidak pernah terpenuhi, seperti data berikut:

Tabel 16.  
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Pinrang Periode 2014-2019

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persent</b>
Laki-Laki	37	92,5 %
Perempuan	3	7,5 %
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Humas DPRD Kab. Pinrang

Pemilih perempuan, sangat rentan untuk kehilangan perannya sebagai subjek dalam pemilihan umum. Hal ini terjadi karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Ketika masih lajang, perempuan berada dalam kuasa orang tuanya. Saat telah menikah, mereka berada dalam kuasa suaminya. Orang tua-terutama ayah dan suaminya yang memutuskan banyak hal terkait kehidupan perempuan. Oleh karena itu saat menggunakan hak pilihnya, perempuan sangat rentan untuk mengalami pengaruh dari suami atau orang tuanya, sehingga mereka tidak dapat secara bebas dan mandiri menentukan pilihannya. Ketidakmandirian perempuan dalam memilih menjadi semakin mutlak, ketika perempuan tidak berdaya secara politik karena rendahnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak politiknya. Dalam situasi demikian, harapan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan, menjadi sangat tipis. Karena pemilih perempuan yang diharapkan dapat memberikan suaranya kepada calon anggota dewan perempuan, ternyata mengalami banyak rintangan untuk menentukan hak politiknya sejak berada dalam rumah tangga.

Untuk memberdayakan perempuan sebagai pemilih mandiri yang dapat menjadi subjek dalam pemilihan umum, diperlukan pendidikan politik bagi perempuan. Yaitu pendidikan yang membuat perempuan menyadari hak-hak politik yang dimilikinya dan menjadikan laki-laki-terutama suami atau ayah mereka lebih menghargai dan menghormati hak-

hak politik perempuan. Sehingga perempuan sebagai pemilih dapat sungguh-sungguh menjadi subjek.

### **5.3 Analisa Data Lapangan dengan Teori**

#### **5.3.1 Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Sebuah tindakan manusia menurut Weber dapat berubah makna menjadi sebuah bentuk tindakan yang bermakna sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain. Tindakan yang bermakna sosial itu dalam bahasa yang lebih khusus oleh Max Weber disebutnya sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 1992:57). Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Perilaku politik Perempuan di Kecamatan Batulappa adalah bentuk tindakan dimana ada perilaku yang sengaja ditampilkan atau ditunjukkan berkaitan dengan kepentingan politik. karenanya dalam melihat perilaku tersebut menggunakan teori tindakan sosial Weber penulis rasa cukup tepat. Penggunaan teori tersebut juga berkenaan dengan permasalahan yang diambil

dalam penelitian ini yaitu menyangkut pola perilaku yang dilakukan masyarakat (perempuan di Kecamatan Batulappa Pinrang) dalam kaitannya dengan kepentingan politik atau pemilu. Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para perempuan yang menjadi subjek penelitian akan dilihat dan dikaji dengan menggunakan pendekatan teori tindakan sosial Max Weber.

Perilaku politik Perempuan dalam penelitian ini dilihat dengan pendekatan teori tindakan sosial seperti misalnya pada fenomena memberikan dukungan suara kepada calon Anggota Legislatif tertentu, perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, artinya tekanan yang dilakukan oleh keluarga seperti suami dan orang tua adalah sebuah tindakan sosial yang mampu mempengaruhi anggota keluarganya, lain lagi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan lainnya seperti partai politik, LSM dan tokoh masyarakat. Perilaku demikian dalam perspektif tindakan sosial merupakan bentuk tindakan yang mempunyai makna subjektif yang ditujukan atau diarahkan kepada orang lain.

Selain itu adanya gerakan mobilisasi yang dilakukan oleh beberapa kandidat atau caleg seperti memberikan imbalan berupa sembako kepada para calon pemilih dalam hal ini adalah pemilih perempuan merupakan sebuah bentuk manifestasi dari tindakan sosial karena beberapa dari pemilih merespon dan bahkan menerima pemberian tersebut dan menjatuhkan pilihannya kepada caleg bersangkutan.

Ini menunjukkan bahwa teori Tindakan Sosial dari Max Weber masih berlaku pada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

### **5.3.2 Perspektif Teori Pilihan Rasional J. Coleman**

Teori Pilihan Rasional Menurut James S. Coleman adalah “Tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan itu) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Tetapi, Coleman selanjutnya menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Berkaitan dengan pernyataan teori diatas dengan hasil penelitian dapat dibedakan antara pemilih yang rasional dan pemilih tidak rasional. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapatkan informasi yang cukup. Tindakan dalam pengambilan keputusan memilih bukan berdasarkan pada faktor kebetulan dan kebiasaan, bukan pula untuk kepentingan sendiri, namun untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangan logis. Pemilih rasional juga merupakan pemilih yang melakukan penilaian secara valid atas tawaran yang disampaikan oleh kandidat. Apabila dihubungkan dengan hasil penelitian yang dilakukan tentang Perilaku Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Batulappa menggambarkan fenomena seperti adanya pemberian dari pihak Calon

Anggota Legislatif dan juga beberapa Tim sukses tidak mampu merubah keputusan politik dari pemilih atau Responden. Mayoritas Responden Perempuan memberikan pernyataan mengenai penolakannya terhadap adanya praktik-praktik politik uang (money politic) namun juga tidak sedikit yang menerimanya. Artinya mayoritas informan telah melakukan penilaian secara validitas tawaran dari pihak kandidat calon Anggota legislative maupun tim sukses seperti yang tertera pada kualifikasi dari penggolongan pemilih yang rasional. Kemudian beberapa Responden memberikan respon terhadap adanya praktik-praktik money politic. Dengan menjawab bahwa ia akan menerimanya, namun bukan berarti hal tersebut kemudian dapat mengubah pilihannya dibalik bilik suara. Artinya walaupun menerima, informan tersebut tetap akan memilih sesuai dengan pilihannya sendiri. Rasionalitas individu dinilai dari sejauh mana individu tersebut mengambil keputusan berdasarkan atas nilai-nilai yang dia pegang, dan bukan dari tujuan yang dia kehendaki. Rasional juga berarti ketika dijatuhkannya pilihan tersebut ialah berdasarkan pertimbangan yang logis dan telah memperoleh informasi yang cukup. Artinya bahwa pilihan rasional perempuan juga didasarkan pada informasi yang dia terima dan dijadikan sebagai preferensi seperti yang di ungkapkan oleh J. Coleman.

Apa yang disampaikan Oleh J. Coleman tentang Pilihan Rasional adalah sebuah teori yang masih sangat relevan dimasyarakat saat ini khususnya dalam kasus pemilu seperti pada saat Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

### 5.3.3 Perilaku Politik Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan maka penulis akan mengaitkan dengan teori-teori tentang perilaku politik perempuan yang mana telah di bahas pada Bab II.

Komponen yang diteliti	Pandangan/ pemikiran teoritis	Temuan dilapangan
Perilaku politik perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sudijono (1995:3) juga menjelaskan bahwa perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, antara kelompok, dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sebagian besar pemilih perempuan tidak sepakat atau tidak menginginkan perempuan terlibat dalam urusan politik.</li> <li>➤ Perempuan lebih percaya laki-laki untuk memperjuangkan hak-hak politiknya dibanding sesamanya perempuan.</li> <li>➤ Perempuan terkesan hanya dimobilisasi pada pemilihan anggota legislative tahun 2014.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Weber dalam Ritzer 1975).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perempuan dalam mengambil sikap politik lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternalnya.</li> <li>➤ Tindakan sosial dalam hal ini</li> </ul>

		<p>adalah tindakan politik dalam memilih pada pemilihan anggota legislative 2014 sebenarnya mereka hanya cuek dan apatis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mereka pesimis akan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan-keputusan politik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Teori pilihan rasional menurut James S. Coleman dalam Wirawan (2012:191). adalah “tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan itu) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perempuan dalam menjatuhkan pilihannya pada pemilihan anggota legislative 2014 memiliki tiga tipe kategori: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasional retrospektif yaitu atas pertimbangan pengalaman masa lalu dan penilaian terhadap integritas caleg</li> <li>➤ Rasional pragmatis-adaptif yaitu lebih mengedepankan nilai untung-rugi</li> <li>➤ Rasional prospektif yaitu lebih</li> </ul> </li> </ul>

		menekankan pada pereubahan yang lebih baik kedepannya
--	--	---

Secara umum perilaku politik perempuan di Kecamatan Batulappa pada pemilihan anggota legislative 2014 memiliki perilaku yang hampir semuanya sama dalam bersikap dan menjatuhkan pilihan politik. Sesuai hasil penelitian menunjukka bahwa perilaku politik perempuan banyak dipenagruhi oleh internal lingkungannya.

Kemudian dalam konteks pilihan rasional, kebanyakan dari mereka masih bersikap pragmatis-adaptif dimana model pemilih semacam ini hanya mementikan kebutuhan sesaat semata dan lebih banyak bersikap apatis terhadap proses politik pada saat pemilihan anggota legislative tahun 2014, kelaamanan dan kekuarangan ini seharusnya menjadi acuan dan referensi para penyelenggara pemilu untuk kedepannya.

#### 5.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Perempuan

Komponen yang diteliti	Pandangan/ pemikiran teoritis	Temuan dilapangan
Factor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik perempuan	➤ Banyak hal yang menjadi factor yang mempengaruhi perilaku politik perempuan, seperti lingkungan, pengetahuan dan sebagainya (Surbakti. 1992:16)	➤ Pengetahuan pemilih perempuan tentang politik dan identitas para caleg membuatnya mereka lebih banyak menyerahkan urusan politik kepada keluarganya atau suaminya.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Selain factor pengetahuan, factor lingkungan juga memberikan pengaruh besar terhadap perilaku politik perempuan seperti hubungan keluarga dan budaya local.</li> <li>➤ Dan yang terakhir adalah intervensi dari kelompok-kelompok kepentingan baik partai politik, tim sukses, tokoh masyarakat maupun keluarga.</li> </ul>
--	--	--

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan pilihan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang dalam masyarakat. Dominannya budaya tradisional yang patriarkis mengakibatkan lebih disukai calon Anggota Legislatif Laki-laki daripada calon Anggota Legislatif Perempuan khususnya dalam konteks sosial di mana para responden penelitian ini berasal yaitu di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Latar belakang pendidikan para responden juga tidak banyak memengaruhi nilai-nilai peran jender patriarkis yang telah terinternalisasi dalam diri mereka.

Implikasi dari penelitian ini adalah pemahaman tentang perilaku memilih dan faktor yang mendasarinya sangat diperlukan untuk memahami perilaku politik. Memang ada ke-khasan tersendiri dalam perilaku berpolitik di Indonesia

terkait dengan gender. Nilai Indonesia terkait dengan peran gender juga berbeda. Budaya patriarki juga dominan pada peran gender yang dianut pada masyarakat. Meskipun demikian, secara ilmiah penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan melihat perbedaan sosial budaya, misalnya daerah perkotaan dan pedesaan. Perilaku politik, khususnya penentuan pilihan pada pemilihan Anggota Legislatif 2014, seperti dalam penelitian ini tentu berbeda dengan perilaku politik orang pedesaan yang lebih tergantung pada patron yang mereka anut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perilaku politik perempuan merupakan suatu produk sosial yang tidak hadir dengan begitu saja. Terdapat faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku dan pilihan politik perempuan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kami dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebanyak 76,0 % pemilih perempuan yang tidak menginginkan jika perempuan terlibat dalam urusan politik, dan hanya 32,0 % pemilih Perempuan yang menjatuhkan pilihan politiknya pada Caleg dari kalangan Perempuan, hal ini berimplikasi pada representasi keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang pada tahun 2014 sangat minim yaitu hanya 3 orang atau 7,5%, dari total 40 orang Anggota DPRD, sementara aturan mengisyaratkan minimal 30 %.
2. Keterlibatan perempuan pada pemilihan Anggota Legislatif tahun 2014 cukup tinggi, yaitu sekitar 91,0 %, namun tingginya partisipasi pemilih perempuan tersebut bukan karena kesadaran akan hak politiknya, tapi lebih dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kerabat dan tim sukses seperti mobilisasi yang dilakukan oleh para kandidat, tim sukses, tokoh masyarakat dan keluarga itu sendiri.
3. Sikap pemilih perempuan dalam menjatuhkan pilihannya pada pemilihan Anggota Legislatif tahun 2014 memiliki tiga jenis perilaku berdasarkan rasionalitasnya yaitu: *rasional retrospektik* atau pemilih yang melihat latar

belakan atau integritas seorang caleg, *rasional pragmatis-adaptif* atau pemilih yang berdasarkan untung rugi, dan yang terakhir adalah *Rasional porspektif* atau pemilih yang betul-betul menginginkan perubahan yang lebih baik dimasa depan.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan beberapa factor yang mempengaruhi perilaku politik perempuan pada pemilihan anggota legislative tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten pinrang sebagaigai berikut:

#### 1. Factor Pengetahuan

Pengetahuan pemilih perempuan di Kecamatan Batulappa tentang persoalan politik sangat minim sehingga mereka terkesan menjadi pemilih apatis dan hanya acuh-tak acuh dalam menjatuhkan pilihan politiknya, inilah yang banyak di manfaatkan oleh para kelompok kepentingan dalam memperoleh dukungan suara.

#### 2. Faktor Lingkungan

Dalam dunia sosial termasuk pemilihan anggota legislative lingkungan sangat berperan dalam membentuk sikap dan karakter individu maupun kelompok, seperti cultur, agama, etnis dan lain-lain. Perempuan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang dia terima, dimana pilihan politik ini juga ternyata berkorelasi dengan kondisi lingkungan dimana perempuan itu tinggal. Hal ini membuat pilihan politik tiap perempuan berbeda-beda. Terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh tentang profil partai, figur caleg, serta visi dan misinya.

### 3. Intervensi atau tekanan

Intervensi dari beberapa kelompok penekan (*pressure group*) pada pemilihan Anggota Legislatif 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap para pemilih perempuan pada saat itu seperti timsukses atau kelompok kepentingan yang lain. Namun yang paling mengintervensi atau yang mempengaruhi adalah dari lingkungan internalnya sendiri yaitu keluarga (orang tua, suami, dan saudara).

## **B. Saran**

1. Sekiranya perlu diadakan lebih banyak lagi penelitian yang mengungkapkan perilaku pemilih perempuan agar tergambar jelas bagaimana kondisi sekarang dan perubahan yang mendasar dalam setiap pesta demokrasi yang dihelat lima tahun sekali, karena pemilih adalah penentu dari bagusnya demokrasi yang dianut oleh Negara ini.
2. Perlu diadakannya kajian tentang perilaku politik secara umum yang lebih mendalam. Dan perhatian pemerintah terhadap pemilih bukan hanya setelah kepentingan mereka terpenuhi kemudian pemilih ditinggalkan namun harus intens turun kemasyarakatan memberikan pelatihan atau semacamnya tentang pemahaman politik yang baik.
3. Perlu diadakannya pendidikan politik kepada semua warga Negara agar Indonesia secara menyeluruh memiliki pemilih-pemilih yang cerdas dan buah produk dari pilihannya membawa Indonesia lebih baik.

4. Pemerintah dan penyelenggara pemilu bersama dengan partai politik seharusnya intens turun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pendidikan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asfar, M. 2004. *Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Merdeka.
- Anwar, M. Khoirul dkk. (2006). *Perilaku Partai Politik,: Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Downs, Anthony. "An Economic Theory of Political Action In a Democracy". *The Journal of Political Economy*, 1957, No. 2: 135-150
- Creswell. Jhon W. 2010. *Reserch Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed methods*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Efriza, 2012, *Political Explorer : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfabeta
- Fakih, Mansor, Dr. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanzah, 2012. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, edisirevisi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Faulks, Keith. 2014. *SosiologiPolitikPengantarkritis*. Bandung: Nusa Media.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson, 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik Ditengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hidayat. 2002. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lipset. S. Martin. 2007. *Political Man. Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

- KPUD Kab. Pinrang. 2014. *Hasil Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014*. Pinrang : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pinrang.
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mashod, Mohtar dan Nasikun. 1987. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: PAU- Studi UGM
- Mubarok, Mufti. 2005. *Suksesi Pilkada*. Surabaya: PT. Jaya Pustaka Media Utama
- Mujani, Saiful. R. William Liddle, Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan publika.
- Narbuko, dkk. 2005 *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nursal, Adnan, 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Nurland, Farida. 2002. Strategies for Improving Women's Participation in Politics and Social Life, presentation at the Provincial Workshop, Makassar
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Rush, Michael & Althoff, Phillip. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada.
- Taskakkori, Abbas dan Carles Taddlie. 2010. *Mixed Methodology*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rumidi, Sukandar. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Raharjo, Wasisto. 2015. *Politik nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Sastroadmojo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Salossa, Daniel. 2005. *Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Media Presindo
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Upe. 2008. *Sosiologi Politik Kontempore*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Ulfaizah. 2006. *Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara*. Semarang: FIS Unnes.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-teori Sosial dalam tiga paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<http://febasfi.blogspot.com/2012/12/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>(diakses pada tanggal 7/10/2015)

<http://ierhamnewblog.blogspot.com/2015/05/partisipasi-politik-dan-perilaku-politik.html>(diakses pada tanggal 8/10/2015)

<https://pinrangkab.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>(diakses pada tanggal 12/06/2016)

<https://pinrangkab.kpu.go.id/index.php>(diakses pada tanggal 12/06/2016)

## DOKUMENTASI

Keterangan Gambar	Foto/Dokumentasi
<p>Wawancara dengan Ibu Wahida, Aminah dan Ibu Hasni di areal kantor Kecamatan</p>	
<p>Wawancara dengan tokoh pemuda Desa Tapporang Kecamatan Batulappa</p>	
<p>Wawancara dengan Bogel/Amransalhasatutokoh Masyarakat di Desa Watang Kassa</p>	

Wawancara dengan Ibu Herna dan Ibu Darma



Ngopi dan diskusi bersama Bapak Bupati Pinrang H. A. Aslam Patonangi di areal Kantor Bupati



Wawancara dengan Muh. Takdir Salah Satu Anggota PPK Kecamatan Batulappa



Wawancara dengan Bapak Camat Batulappa, Muh. Rusli, S.Sos di Salah satu Warkop di Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan penggiat politik Kecamatan Batulappa.



## RIWAYAT HIDUP



**ABD. RASYID** di lahirkan di Pinrang, 12 Juli 1988. Penulis adalah anak ketiga dari delapan bersaudara, yang merupakan buah hati dari pasangan Abd Muiz dan Hasniah.

Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada tahun 1995 di SD Negeri 151 Loka Desa Kaseralau Kec. Batulappa Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah penulis dibesarkan, di sekolah tersebut penulis menempuh pendidikan selama enam tahun dan selesai pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Punnia Kabupaten Pinrang dan selesai pada tahun 2004 setelah selesai penulis melanjutkan lagi pendidikannya di MA Muhammadiyah Punnia Sekolah yang sama dan akhirnya selesai pada tahun 2007.

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Punnia Tersebut, penulis memutuskan untuk tidak berhenti sampai di situ dan memilih melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di kota Makassar yang memang menjadi keinginan dan pilihan penulis sendiri yakni Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, penulis mengambil program strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi dan selesai pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 penulis mengikuti test untuk program magister dan Alhamdulillah Penulis di terima di Universitas Hasanuddin jurusan Sosiologi. Hingga akhirnya di tahun 2016 ini penulis dapat menyelesaikan studi dengan tugas akhir yaitu Tesis dengan Judul: **Perilaku Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar magister.